



IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS)

(Studi Pada SMAN 2 Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AZIZAH AJENG TRISTIANA

NIM. 135030700111002



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
MALANG
2017**

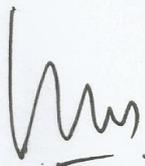
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi GLS (Gerakan Literasi Sekolah) (Studi Pada SMAN 2 Malang)
Disusun oleh : Azizah Ajeng Tristiana
NIM : 135030700111002
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Perpustakaan

Malang, 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Darmono, M. Si
NIP. 19590309 198403 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) (Studi Pada SMAN 2 Malang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang,



Nama: Azizah Ajeng Tristiana
NIM : 135030700111002



CURRICULUM VITAE

Nama : Azizah Ajeng Tristiana

NIM : 135030700111002

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Januari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Dusun Krajan RT 02 RW 06 Tegalharjo, Kec.

Glenmore, Kab. Banyuwangi

Email : azizahajeng02@gmail.com

Nomor HP : 085258787022

Riwayat Pendidikan :



No	Instansi	Tahun
1	TK RS. Bhakti Husada	1998-2000
2	Sekolah Dasar Negeri 4 Tegalharjo	2000-2006
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalibaru	2006-2009
4	Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Genteng	2009-2012
5	Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	2013-Sekarang



Pengalaman Organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	OSIS SMPN 1 Kalibaru	Anggota	2007-2008
2	HMPIP FIA	Staff divisi Seni	2015-2016

Pengalaman Kepanitiaan :

No	Nama Kepanitiaan	Jabatan	Tahun
1	Kegiatan Makrab Ilmu Perpustakaan	Staff Konsumsi	2014
2	PK2MABA Universitas Brawijaya	Anggota Divisi DDM	2014
3	PK2MABA Universitas Brawijaya	Koordinator Sub DDM	2015
4	Kegiatan Pembinaan Budi Pekerti Universitas Brawijaya	Koordinator Sub DDM	2015
5	Kegiatan Sekolah Kebangsaan Universitas Brawijaya	Koordinator Sub DDM	2015

Pengalaman Lain:

No	Nama Kegiatan	Peran	Tahun
1	Kegiatan “Adventure Entrepreneur”	Peserta	2014
2	Seminar Internasional “Union Catalog OCLC”	Peserta	2014
3	Seminar & Talkshow Kepemudaan	Peserta	2014
4	Seminar Nasional “Penguatan Perpustakaan Sekolah Sebagai Penggerak Gerakan Literasi Sekolah”	Peserta	2016



RINGKASAN

Azizah Ajeng Tristiana, 2017, **Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) (Studi Pada SMAN 2 Malang)**, Dr. Irwan Noor, MA, Drs. Darmono, M.Si.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang, yang diperkuat dengan gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Penelitian ini dengan teori Implementasi Edward III menggunakan pendekatan *top-down* yang meliputi variabel: komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dengan tujuan (1) untuk mengetahui gambaran tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran; (2) mengetahui faktor implementasi yang sesuai dengan model kebijakan Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Fokus pada penelitian adalah (1) Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang pada tahap pelaksanaan, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran; (2) faktor yang mempengaruhi implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian, kegiatan Gerakan Literasi Sekolah mempunyai lima komponen literasi yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Namun di SMAN 2 Malang masih pada literasi dasar, literasi perpustakaan dan telah menghasilkan beberapa program kegiatan GLS. Selanjutnya implementasi GLS di SMAN 2 Malang telah terlaksana dengan baik sesuai teori Edward III (1980).

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

SUMMARY

Azizah Ajeng Tristian, 2017, **Implementation of School Literacy Movement (SLM) (Study at SMAN 2 Malang)**, Dr. Irwan Noor, MA, Drs. Darmono, M.Si.

This research was conducted to find out the implementation of School Literacy Movement (SLM) in SMAN 2 Malang, which is supported by the movement of character improvement as stated Regulation of the Minister of Education and Culture No. 23 years 2015.

This research based on the theory of Implementation Edward III using top-down approach Which includes variables: communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure. The purposes of this study are (1) to find out the description of the implementation of School Literacy Movement (SLM) in SMAN 2 Malang at the phase of habituation, development, and learning; (2) to know the implementation factors in accordance with the Edward III policy model those are, communication, resources, disposition and bureaucratic structure

The research method used descriptive research with qualitative approach. Data collection techniques used interviews. The focus of the research were (1) School Literacy Movement (SLM) at SMAN 2 Malang at the implementation phase, namely habituation, development, and learning; (2) factors affecting the implementation of the School Literacy Movement (SLM). Data analysis method in this study using interactive models Miles, Huberman, and Saldana.

The results of the research, School Literacy Movement activities have five components of literacy, namely basic literacy, library literacy, media literacy, technology literacy, and visual literacy. However in SMAN 2 Malang is still on the basic literacy, library literacy and has produced several programs of SLM activities. Furthermore, the implementation of SLM in SMAN 2 Malang has been implemented well according to the theory of Edward III (1980).

Keywords: Policy Implementation, School Literacy Movement (SLM)





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Kuliah yakni Skripsi yang berjudul **Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) (Studi Pada SMAN 2 Malang)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir individu yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, MS selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Irwan Noor, MA dan Bapak Drs. Darmono, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang membantu lancarnya proses penyusunan skripsi.



5. Ibu Dr. Rr. Dwi Retno Un., M. Pd selaku Kepaa Sekolah SMAN 2 Malang dan Bapak Warsana selaku Kepala Perpustakaan SMAN 2 Malang yang telah berkontribusi memberikan dan terkait dengan tema skripsi ini.
6. Kedua orang tua peneliti Bapak Sutrisno, M.Pd dan Ibu Suyatin atas segala kasih sayang, doa dan dukungan.
7. Keluarga tercinta Antok, Fitri, Alkha atas doa, dukungan, dan kebaikan hati dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi.
8. Sahabat seperjuangan Mai Sovi, Dea, Hardian, Septi, Yudhis, Rara dan Kekasih tercinta Kadek yang telah memberikan dukungan dan yang banyak menjadi teman diskusi.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2013 yang emberikan dukungan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang,

Penulis

**DAFTAR ISI**

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	8
1. Konsep Kebijakan Publik	8
2. Proses Kebijakan Publik	9
3. Implementasi	11
4. Model-model Implementasi	13
5. Model Pendekatan Top-down	15
6. Model Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)	16
B. Komponen Literasi	21
C. Kemampuan Literasi Dasar	24



D. Gerakan Literasi Sekolah (GLS).....	25
1. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS).....	29
2. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS).....	29
3. Strategi Gerakan Literasi Sekolah (GLS).....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Analisis Data.....	42
H. Keabsahan Data.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMAN 2 Malang.....	46
1. Profil SMAN 2 Malang.....	46
2. Visi dan Misi SMAN 2 Malang.....	47
3. Tujuan SMAN 2 Malang.....	48
4. Struktur Organisasi SMAN 2 Malang.....	50
B. Penyajian Data.....	50
1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.....	50
a. Literasi Dasar.....	51
1) Tahap pembiasaan.....	52
2) Tahap pengembangan.....	53
3) Tahap pembelajaran.....	55
b. Literasi Perpustakaan.....	56
1) Tahap pembiasaan.....	57
2) Tahap pengembangan.....	58
3) Tahap pembelajaran.....	60
c. Kegiatan Literasi.....	61
1) Literasi Budaya Membaca.....	61
2) Literasi Budaya Menulis.....	62
3) Literasi atau Budaya Menulis Bagi Pendidik atau Guru.....	65
4) Penerbitan Tabloid Bahtera Yang Mempunyai ISSN Memuat Karya Tulis Peserta Didik atau Siswa dan Guru... ..	66
d. Lomba Kegiatan Literasi di SMAN 2 Malang.....	66
e. Tim Literasi SMAN 2 Malang.....	68



2. Faktor Yang Mempengaruhi Impelementasi Gerakan Literasi (GLS) pada SMAN 2 Malang	69
a. Komunikasi	69
b. Sumber daya manusia	72
c. Disposisi	76
d. Struktur birokrasi	77
C. Analisis Data dan Pembahasan	80
1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran	80
a. Literasi Dasar	81
b. Literasi Perpustakaan	82
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang	83
a. Komunikasi	84
b. Sumber daya manusia	86
c. Disposisi	88
d. Struktur Birokrasi	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

93



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik	74
2.	Tingkat Pendidikan Tenaga Kependidikan	74



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Implementasi Edward III.....	21
2.	Strategi Pelaksanaan GLS	33
3.	Pemangku GLS	34
4.	Analisis Data	43
5.	Peta SMAN 2 Malang	46
6.	Struktur Organisasi.....	50
7.	Hasil Temuan GLS di SMAN 2 Malang.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Foto-foto.....	96
2.	Pedoman Wawancara.....	100
3.	Surat Keterangan Riset.....	101
4.	Surat Keterangan Menyelesaikan Riset.....	102
5.	Jurnal Harian Peserta Didik.....	103
6.	Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

SMAN 2 Malang merupakan sekolah *pioneer* pelaksana Gerakan Literasi Sekolah (GLS) se-Malang Raya. GLS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu kegiatan penumbuhan budi pekerti adalah kegiatan wajib membaca 15 menit buku nonpelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan kegiatan tersebut agar siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah.

Literasi (membaca dan menulis) perlu ditanamkan dan dibudayakan di dunia pendidikan khususnya satuan pendidikan formal atau sekolah. Mengingat pentingnya kegiatan literasi, kemampuan berliterasi, serta budaya literasi bagi individu dan masyarakat. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) (2003), juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, dan menggunakan informasi. Kemampuan tersebut perlu dimiliki oleh setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi dan pembelajaran sepanjang hayat.

Berdasarkan data UNESCO pada tahun 2012, indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai angka 0,001, artinya setiap 1.000 penduduk, hanya satu



orang yang memiliki minat baca (<http://www.kompasiana.com>). Demikian juga menurut World's Most Literate Nations (2016), minat baca masyarakat Indonesia berada di urutan ke-60 di antara total 61 negara. Minat baca masyarakat Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (<http://www.ikapijateng.or.id>). Negara maju meyakini bahwa betapa pentingnya budaya baca bagi bangsanya dan akan melakukan segala hal untuk dapat menumbuhkan budaya bangsanya. Negara maju menganggap kemampuan literasi adalah syarat utama bagi keberhasilan siswa dan bagi kemajuan bangsa.

Menurunnya minat baca berbanding sejajar dengan kemampuan literasi peserta didik di era abad 21 juga menurun. Kemampuan literasi sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan era sekarang ini. Apabila kemampuan literasi menurun, maka mutu pendidikan juga sama menurun. Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan salah satu aktivitas penting dalam hidup.

Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Literasi bermakna praktik hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003). Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan baik di sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat.

Budaya membaca sangat rendah dilakukan oleh sebagian peserta didik. Membudayakan membaca kepada peserta didik bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Dengan demikian budaya membaca bagi peserta didik akan banyak memberikan manfaat dalam kehidupannya khususnya kesuksesan belajar atau



pendidikannya. Kebiasaan membaca peserta didik akan mengantarkan mereka menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa Indonesia karena kebiasaan membaca akan menjadi budaya yang dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemajuan bangsa.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat (1): “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mempunyai ciri-ciri antara lain : (1) selalu belajar meningkatkan kemampuan, (2) mampu menguasai dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) mampu memproduksi kebutuhan pokok sendiri, (4) mampu bersaing bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara lain, (5) bangga menjadi sebuah bangsa dengan segala kepribadian. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut perlu diselenggarakan sistem pendidikan nasional memberi kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia memilih dan mengikuti pendidikan menurut bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Warga Indonesia diharapkan tidak hanya cerdas, namun juga mempunyai ciri, sifat dan berwibawa, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Sutarno, 2008:7-8).

Salah satu sekolah yang telah menerapkan kegiatan GLS dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah SMAN 2 Malang. SMAN 2 Malang telah melakukan kegiatan implementasi yang sesuai dengan teori Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi mempunyai beberapa variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut telah diterapkan dengan baik oleh SMAN 2 Malang.



Kegiatan GLS mempunyai lima komponen literasi sesuai dengan panduan GLS di Sekolah Menengah Atas. Komponen literasi terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. SMAN 2 Malang melaksanakan kegiatan GLS belum memenuhi lima komponen literasi. Komponen literasi yang masih diterapkan di SMAN 2 Malang adalah literasi dasar dan literasi perpustakaan.

Pelaksanaan kegiatan GLS di SMAN 2 Malang tidak sejalan dengan variabel implementasi, karena di SMAN 2 Malang masih terdapat tiga komponen literasi yang belum diterapkan yaitu literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Berdasarkan permasalahan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) (studi pada SMAN 2 Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran?
2. Bagaimana faktor implementasi yang sesuai dengan model kebijakan Erward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis gambaran tentang



implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor implementasi yang sesuai dengan model kebijakan Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian dimasa mendatang, sehingga dapat memberi informasi lanjutan kepada para pembaca secara umum.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah di jenjang SMAatausederajat.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi pemikiran dan masukan dalam rangka implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMAN 2 Malang.



E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disesuaikan pada pedoman penyusunan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian pada SMAN 2 Malang dalam implementasi Gerakan Literasi Sekolah. Kemudian menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya memaparkan kontribusi penelitian secara akademis dan praktis. Terakhir berisi uraian singkat perihal bab-bab dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan landasan teori-teori yang digunakan mencakup relevansi pada fokus penelitian. Tinjauan pustaka pada penelitian ini ditujukan berdasarkan landasan teori-teori kebijakan publik, implementasi, model-model implementasi, model pendekatan *top-down*, komponen literasi, kemampuan literasi dasar, GLS (Gerakan Literasi Sekolah).

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di SMAN 2 Malang. Variabel dalam penelitian ini adalah implementasi GLS karena penulis ingin mendeskripsikan implementasi GLS.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Perpustakaan SMAN 2 Malang serta lokasi penelitian, penyajian data, serta memaparkan fenomena dalam tahapan-tahapan analisis



dengan tata cara (metode atau teknik) tertentu, yang selanjutnya menguraikan penyajian data hasil penelitian sesuai dengan konsepsi dan teori yang dipakai dalam rangka pencapaian tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti mendeskripsikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMAN 2 Malang. Selain itu penulis juga mendeskripsikan saran yang dapat dipertimbangkan dengan keadaan SMAN 2 Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Salah satu definisi kebijakan publik menurut Thomas R Dye (dalam Widodo 2013:11) menyatakan, “*Public policy is whatever government choose to do or not to do*” yang artinya kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Senada dengan Dye, Edward III dan Sharkansky dalam Widodo (2013:12) mengemukakan bahwa kebijakn publik adalah “*What goverment say and do, or not to do. It is the goals or purpose of goverment programs*”, adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Pernyataan Dye serta Edward III dan Sharkansky dalam Widodo (2013:12) juga mengemukakan kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Dye dalam Widodo (2013:12) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdiri dari tiga elemen yakni kebijakan publik yang berarti keluaran atas problematika yang ada, pelaku kebijakan yaitu pemerintah, dan lingkungan kebijakan yang merupakan ruang lingkup mana kebijakan akan diterapkan. Sehingga dapat ditarik benang merah mengenai definisi kebijakan publik



sebagai keputusan pemerintah baik pernyataan ataupun perbuatan pemerintah yang berkenaan atau berdampak kepada rakyat.

2. Proses Kebijakan Publik

Sebagaimana terdapat banyak definisi mengenai kebijakan publik dari berbagai pakar, begitu pula terdapat beberapa proses yang dikemukakan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kebijakan publik memiliki ciri unik yakni dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan maka berikut proses kebijakan publik menurut beberapa pakar sebagaimana di kutip Wahab (2014:16):

- a. Anderson membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yakni (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adaption*, (d) *policy implementation*, dan (e) *policy assessment and evaluation*.
- b. Ripley membedakannya dalam empat tahapan, (a) *agenda setting*, (b) *formulation performance, and impact*, (d) *decision about the future of the policy and program*.
- c. Thomas R. Dye menjelaskan ada enam proses kebijakan publik yang meliputi beberapa hal, yakni: (a) *identification of policy problem*, (b) *agenda setting*, (c) *policy formulation*, (d) *legimating of policies*, (e) *policy implementation*, dan (f) *policy evaluation*.

Dari proses kebijakan yang dipaparkan Thomas R. Dye, dapat kita pahami bahwa proses pembuatan kebijakan publik dapat dijabarkan seperti:

- a. Identifikasi masalah. Mengenali dan menggali masalah yang tengah terjadi adalah tahap pertama yang harus dilakukan dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini dilakukan agar pengambil kebijakan tidak salah langkah membuat keputusan yang tepat sasaran dan menyelesaikan permasalahan. Selain mengenali permasalahan, identifikasi juga bisa didasari atas permintaan masyarakat.



b. Penyusunan agenda. “*Who decides what will decided?*”, pernyataan

Dye ini menjadi titik awal untuk melakukan penyusunan agenda.

Karena dengan mengetahui siapa yang akan membuat kebijakan apa akan menciptakan penyusunan agenda secara otomatis. Pernyataan ini

nantinya akan berkembang menjadi siapa saja yang pantas dan ahli dibidangnya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan, dengan demikian tentu akan ditentukan pula apa saja kegiatan yang akan dilakukan para pembuat kebijakan.

c. Perumusan kebijakan. Merumuskan kebijakan dilakukan dengan cara mengumpulkan usulan-usulan yang didapat dari organisasi perencanaan, birokrasi pemerintah, serta lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan. Dalam negara hukum, beberapa hal baru dianggap sah apabila ada hitam diatas putih. Hal ini juga berlaku bagi kebijakan, kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah setelah melalui rangkaian proses sebelumnya harus disahkan lewat perundangan.

e. Implementasi kebijakan. Proses setelah pengesahan kebijakan kedalam perundangan adalah implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan tidak dapat diimplementasikan apabila tidak ada Peraturan Pemerintah yang menjelaskannya teknis pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

f. Evaluasi kebijakan. Proses terakhir adalah evaluasi, dimana evaluasi di sini dapat dilakukan oleh banyak orang, mulai dari lembaga pemerintah

sendiri, konsultan di luar pemerintahan, organisasi masyarakat, pers dan media, serta masyarakat pada umumnya (publik).

3. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009:295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan (Riant Nugroho, 2009:494).

Selanjutnya Riant Nugroho (2009:495) menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti undang-undang dan perda.

Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public*

Policy (1983:61), yang mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Van Meter dan Van Horn (2002:100), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari tiga definisi di atas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Implementasi merupakan suatu kajian studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. (Agustino, 2008:138).

Beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik dalam perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya tiga



pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down*, *bottom up*, dan *hybrid theories*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan yaitu “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

4. Model-model Implementasi

Thomas R. Dye dalam Wahab (2014:154) mengatakan bahwa “*a model is merely an abstravtion or presentation of political life*” artinya bahwa apa yang disebut model pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan kenyataan politik. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa bentuk model implementasi. Model ini berguna untuk menyederhanakan bentuk implementasi dan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Model-model implementasi dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sebuah kebijakan yang diimplementasikan. Untuk menganalisis bagaimana



proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur, Parsons (2008:38) membagi garis besar perkembangan model implementasi menjadi tiga tahap yaitu:

a. Model Rasional (*Top-Down*)

Model rasional (*top-down*) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi berhasil.

b. Model pendekatan (*Bottom-Up*)

Model implementasi dengan pendekatan *bottom-up* sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top-down*). Parsons (2008:38), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

c. Sintesis (*Hybrid Theories*)

Model rasional (*top-down*) memusatkan perhatian pada institusi dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui pendekatan *policy subsystem*, yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan.

Penjelasan model implementasi diatas, model *top-down* menjadi yang paling jelas karena dalam model tersebut menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di tingkat pusat, serta keputusannya dilakukan pada tingkat pusat. Pendekatan bertitik tolak pula dari perspektif bahwa keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh birokrat dibawahnya.

5. Model Pendekatan Top-Down

Model implementasi *top-down* (model rasional) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat implementasi berhasil. Dalam pendekatan *top-down*, kebijakan dilakukan secara tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat. Beberapa model menurut para ahli yang menganut aliran implementasi kebijakan publik *top-down* antara lain (Agustino, 2014:141):

1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini disebut juga “*A model of the Policy Implementation*” yang beranggapan bahwa kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model ini terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja publik yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik.

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model ini disebut juga “*A Framework for Policy Implementation Analysis*”. Peran penting dari implementasi adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel tersebut antara lain: mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

3. Model George C. Edward III (1980)

Model ini disebut juga "*Direct and Indirect Impact on Implementation*". Dalam kebijakan ini, terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4. Model Merilee S. Grindle

Model ini dikenal sebagai model "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurutnya ada 2 (dua) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

6. Model Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)

Menurut teori implementasi kebijakan (Erward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu juga, bagaimana baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak dapat tercapai. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Berdasarkan dengan pengertian implementasi kebijakan diatas, beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Erward III, 1980:10) keempat variabel tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain.

1. Komunikasi

"The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived



by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications”(Edward III, 1980:17).

Berdasarkan pengertian Edward III (1980), komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif apabila pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi kebijakan memiliki 3 dimensi yakni:

a. *Transmission* (transmisi)

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

b. *Clarity* (kejelasan)

Dimensi ini menginginkan agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana kebijakan, sasaran, dan kelompok lain tadi dapat diterima dengan jelas sehingga semua pihak mengetahui dan memahami apa yang

menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika komunikasi transmisi komunikasi terjadi ketidakjelasan, maka para aktor implementasi tidak mampu menyiapkan apa yang dibutuhkan.

c. *Consistency* (konsistensi)

Dimensi terakhir dari variabel komunikasi adalah konsistensi. Informasi yang telah ditransmisikan dan mendapat pemahaman yang baik dari semua pihak diharapkan konsisten dan tidak simpang siur.

2. Sumberdaya

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 1980:53).

Menurut George C. Edward III (1980) bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, sebab sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi dapat terwujud dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3. Disposisi

“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests” (Edward III, 1980:89).

Menurut George C. Edward III (1980), disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan.

Apabila pelaksanaan ingin efektif, maka pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana.

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi. Apabila perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam mendukung disposisi dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar dapat menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya pelayanan publik yang baik.

4. Struktur Birokrasi

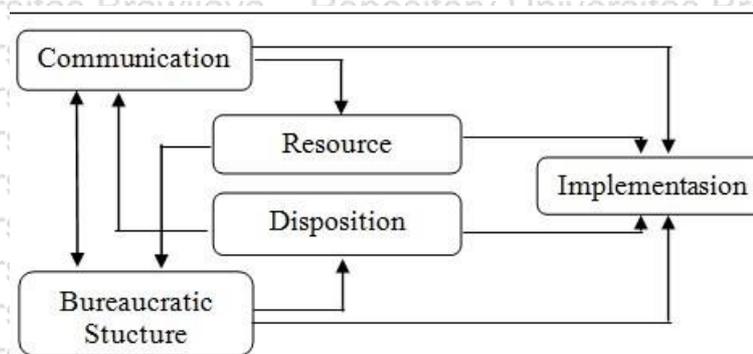
“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia” (Edward III, 1980:125).

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tetapi kemungkinan masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi dalam melayani.

Dua karakteristik utama birokrasi adalah Standart Operasinaonal Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk

keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, dan sering tetap di kekuatan karena inersia birokrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor struktur birokrasi yang mendukung dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi tujuan yang ingin dicapai.



Gambar 1. Model Implementasi Edward III

Sumber: www.google.com

B. Komponen Literasi

Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori (Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 2016:8).

Pada abad 21, kemampuan disebut sebagai literasi informasi. Clay, 2001:8 (dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 2016:8) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Komponen literasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan,

berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

2. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

3. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi.

4. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*Computer Literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.

5. Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk tercetak, di televisi maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

Komponen yang telah dijabarkan merupakan bentuk-bentuk literasi yang mendukung tercapainya tujuan dari literasi informasi. Merujuk pada arti literasi yang telah disimpulkan maka berbagai bentuk literasi tersebut sangat dibutuhkan dan pada akhirnya, kelima komponen ini saling melengkapi untuk tercapainya literasi informasi.

C. Kemampuan Literasi Dasar

Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis.

Deklarasi Praha tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Literasi informasi terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan tersebut dimiliki oleh setiap individu sebagai syarat berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat, UNESCO (2003) dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:7).

Literasi yang diartikan sebagai kemampuan baca tulis, selanjutnya menurut Kuder dan Hasit (2002) pengertian literasi berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, melihat. Dalam proses membaca terjadi proses yang rumit yaitu proses kognitif, linguistik, dan aktivitas sosial.

Pembaca harus aktif melibatkan pengalaman sebelumnya, proses berpikir, sikap, emosi dan minat untuk memahami bacaan. Konsep literasi dan perkembangan literasi bervariasi dalam sejumlah aspek dan variasi ini bersifat implisit saat membahas literasi.

Selanjutnya dalam perkembangan konsep literasi, muncul konsep literasi dasar sejak Marie Clay (2001:118) memperkenalkan konsep *emergent literacy*, yang merupakan perilaku pura-pura membaca dan menulis pada anak. Literasi dasar juga disebut dengan istilah *early literacy*, yang menggambarkan bahwa kemampuan ini

merupakan kemampuan awal yang mendasari kemampuan membaca dan menulis yang sesungguhnya. Literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

Pandangan *emergent literacy* menganggap terjadi perkembangan secara berkelanjutan dalam memperoleh kemampuan baca tulis, perkembangan ini tidak dimulai sejak masuk sekolah tetapi dimulai sejak usia dini. Weigel dkk (2010) memilah kemampuan literasi dasar menjadi tiga; pengetahuan tulisan (*print knowledge*), dasar-dasar menulis (*emergent writing*), dan minat membaca (*reading interest*).

Kemampuan literasi dasar yang baik membantu anak untuk lebih mudah belajar membaca dan meningkatkan tingkat kesuksesan anak di sekolah

Dari uraian diatas telah dijelaskan literasi dasar sebagai kemampuan yang dimiliki siswa untuk melandasi dan menyiapkan diri belajar membaca dan menulis.

Komponen kemampuan dasar literasi terdapat 5 komponen yang berbeda, yaitu: a) kemampuan bahasa yang mencakup kosa kata dan pemahaman bahasa lisan, b) kesadaran fonologis, yaitu kemampuan mendeteksi, memanipulasi dan menganalisis bahasa lisan, c) keterampilan membaca yang mencakup pengenalan aturan membaca, pengetahuan huruf dan bunyi huruf, mengeja kata, d) keterampilan menulis, yang mencakup kemampuan menuliskan bentuk huruf, nama sendiri dan kata, e) minatataumotivasi, yaitu keinginan dalam diri anak untuk membaca.

D. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Budaya dalam Kamus Besar Indonesia (1989) diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil. Membudaya bermakna menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, mendarah daging. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Literasi sekolah dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS) berdasarkan Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMA (2016:2) adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Sedangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yangarganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Gerakan ini bertujuan menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar warga sekolah mampu mengolah pengetahuan, dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Empat butir nawacita yang terkait erat dengan komponen literasi sebagai modal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. Butir nawacita yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di dunia

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Esensi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah aktivitas membaca ditindaklanjuti dengan kegiatan kreativitas menulis. Kemampuan yang harus dimiliki orang seorang penulis menurut Syafie (1998:45) adalah:

1. Kemampuan menemukan masalah yang akan ditulis
2. Kepekaan terhadap kondisi bacaan
3. Menyusun perencanaan penulisan
4. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia
5. Kemampuan memulai menulis
6. Kemampuan memeriksa naskah sendiri.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rusyana (1984:40) menyatakan bahwa kemampuan menulis mencakup berbagai kemampuan seperti: kemampuan menguasai gagasan yang akan dikemukakan, kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa, kemampuan menggunakan bentuk karangan, kemampuan menggunakan gaya, dan kemampuan menggunakan ejaan dan tanda baca.

Menurut Beers (2009) dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:11), praktik-praktik yang baik dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Tahap pengembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antar tahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.
- b. Program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti sastra untuk anak remaja.

- c. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran.
- d. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun.
Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.
- e. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada pengalaman multikultural.

Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi,

Beers, dkk (2009) dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:12)

menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah.

- a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di sudut baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap pengembangan budaya literasi.
- b. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Pimpinan

sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antar guru dan tenaga kependidikan. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.

- c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya.

1. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) berdasarkan Panduan Gerakan

Literasi Sekolah di SMA (2016:2):

a. Tujuan Umum

Menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pemberdayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

b. Tujuan Khusus

1. Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah.
2. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.
3. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.
4. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

2. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan secara bertahap

dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah. Kesiapan ini mencakup kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan). Untuk memastikan keberlangsungan dalam jangka panjang, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan dengan tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

Tiga tahap pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) berdasarkan Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:27-28):

1. Tahap pembiasaan: Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca (Permendikbud No.23 Tahun 2015).

Pembiasaan kegiatan membaca di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik.

2. Tahap pengembangan: Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan.

Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan (Anderson dan Krathwohl, 2001)

3. Tahap pembelajaran: Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua

mata pelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran menurut

Anderson dan Krathwol (2001) dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:28). Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis.

Kegiatan membaca pada tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku non- teks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA atau SMK. Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas.

3. Strategi Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

1) Strategi Umum

Peningkatan kapasitas di semua lini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga satuan pendidikan dapat dilakukan mulai pelaksanaan GLS di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMLB, SMALB) dengan strategi, antara lain:

- a. Menggulirkan dan menggelorakan gerakan literasi di sekolah

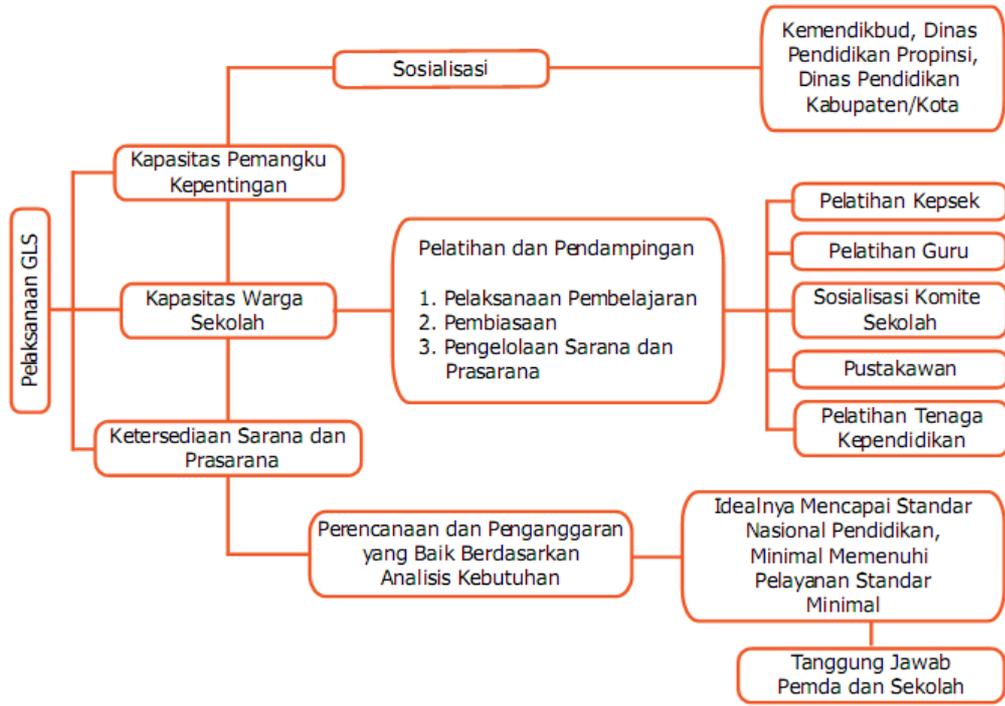


- b. Menyiapkan kebijakan pimpinan dari pusat sampai daerah dengan program GLS yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan hingga ke tingkat satuan pendidikan
- c. Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, melalui:
 - 1. sarana prasaranaataulingkungan sekolah, perpustakaan, dan buku
 - 2. sumber daya manusia (pengawas, kepala sekolah, guru, pustakawan, komite sekolah)
- d. Menyemai gerakan literasi akar rumput
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya GLS
- f. Memberikan apresiasi atas pencapaian literasi berupa pemberian penghargaan literasi (Adiliterasi)
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan berkeanjutan bagi GLS

2) Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dapat dipaparkan pada bagan berikut.





Gambar 2. Strategi Pelaksanaan GLS

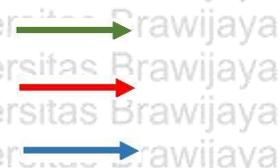
Sumber: Kemendikbud, 2016

Kesuksesan GLS ditentukan oleh adanya dukungan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, meningkatnya peran dan kapasitas warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pustakawan, dan komite sekolah). Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Keberlangsungan GLS juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kegiatan GLS.

4. Pemangku Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Peran pemangku kepentingan GLS Dikmen dipaparkan pada bagan sebagai berikut.

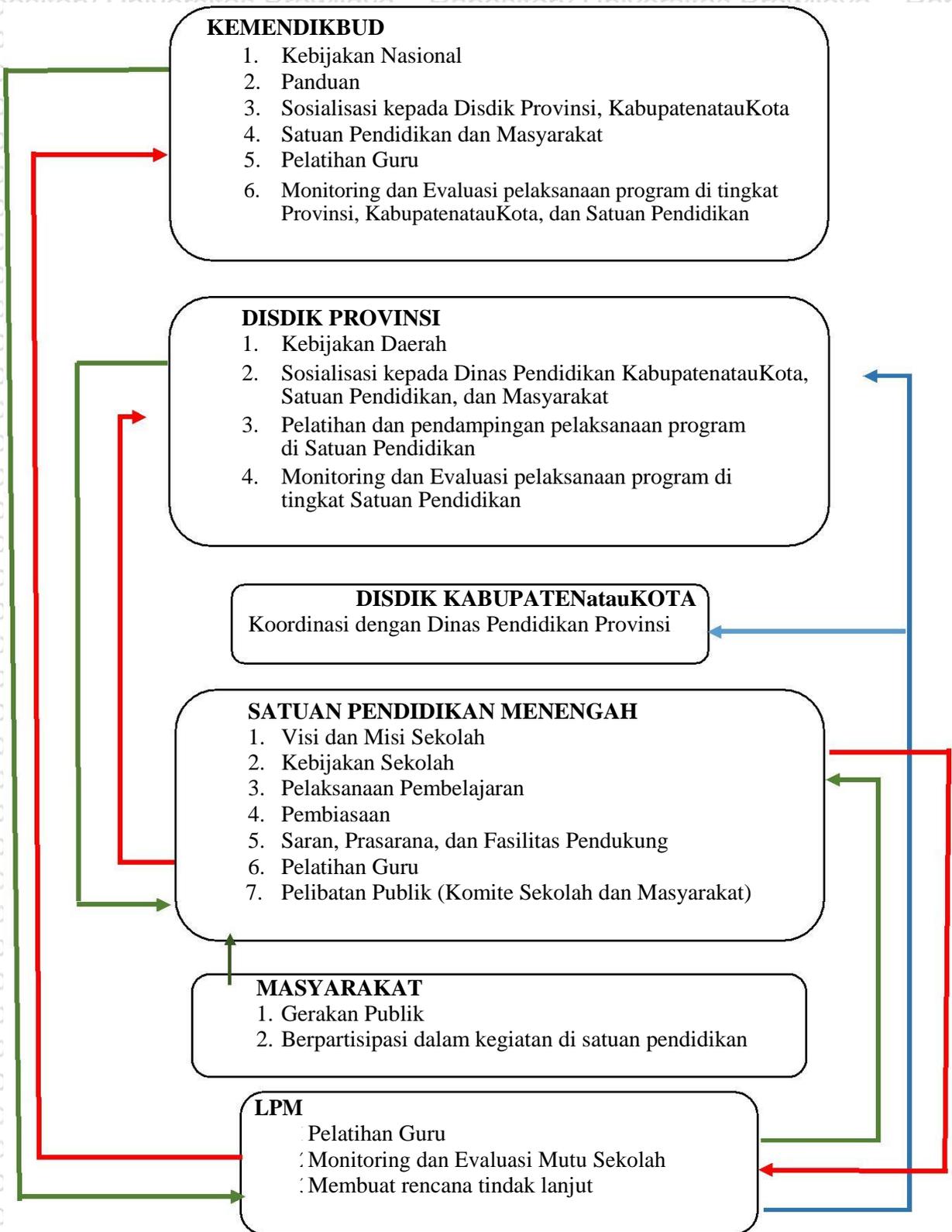
*Keterangan



STRUKTUR IMPLEMENTASI

GARIS PELAPORAN

GARIS KOORDINASI



Gambar 3. Pemangku GLS
 Sumber: Kemendikbud, 2016

Berikut penjelasan dari pemangku GLS:

- 1) Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
 - a. Memuat kebijakan literasi
 - b. Menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS
 - c. Menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS
 - d. Melaksanakan sosialisasi GLS kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat
 - e. Merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan
 - g. Membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS
- 2) LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)
 - a. Melaksanakan pemetaan awal data kebutuhan literasi sekolah GLS
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota untuk melaksanakan GLS
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik
 - d. Melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS
 - e. Melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS
 - f. Melaporkan hasil pemetaan akhir ke Ditjen Dikdasmen Kemendikbud
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di satuan pendidikan tingkat provinsi dan lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota
 - h. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Melakukan kompilasi analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing
 - b. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS
 - c. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik
 - e. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, dan sarana yang mendukung program GLS
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan satuan pendidikan menengah
 - g. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan GLS

- 4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendukung pelaksanaan GLS di tingkat satuan pendidikan menengah
- 5) Satuan Pendidikan
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan standar nasional pendidikan
 - b. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran
 - c. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik
 - d. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran
 - e. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik
 - f. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku)
 - g. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah
 - h. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah
 - i. Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu
 - j. Tim Literasi Sekolah (LTS) mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS
 - k. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat
 - l. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS
 - m. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan
 - n. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS
- 6) Masyarakat
 - a. Ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah
 - b. Menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Menurut Moleong (2010:27) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode deskriptif, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasilnya disepakati bersama antara peneliti dan subyek penelitian. Penelitian kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sangat penting dilakukan untuk membatasi suatu masalah dalam penelitian dan pembatasan suatu masalah dalam penelitian ini dapat diperoleh dari pengalaman langsung peneliti di lapangan dan pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah (Moleong, 2013:97).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab I, maka fokus dari penelitian ini adalah

1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang pada tahap pelaksanaan, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 2 Malang, yakni:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi

Peneliti mengambil 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari Model Edward III (1980), karena variabel diatas adalah yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 2002:52). Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah SMAN 2 Malang di jalan Laksamana Martadinata No.84 Malang.

Sedangkan untuk situs penelitiannya adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data dan menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Adapun situs penelitian:

1. SMAN 2 Malang yang telah menerapkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan telah pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

2. SMAN 2 Malang merupakan Sekolah Rujukan dan model sentra pengembangan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Malang Raya.

D. Data dan Sumber Data

Keberadaan sumber data memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian.

Arikunto (2006:129) menjelaskan bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(Moleong, 2007:157).

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan sekunder. Kedua data tersebut sangat diperlukan untuk menetapkan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian, dan selain itu untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian dengan menggunakan metode observasi ataupun wawancara. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari pengamatan langsung dan wawancara kepada informan yaitu:
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Guru
 - c. Siswa
 - d. Pustakawan



e. Kepala Perpustakaan

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, seperti dokumen, catatan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari SMAN 2 Malang dan data lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini yang diperoleh baik dari internet, buku dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2011:224) . Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, dimana peneliti dalam pengamatan ikut melakukan kegiatan peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan teras terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2008). Adapun alat bantu yang digunakan untuk observasi adalah buku catatan dan *tape recorder*. Observasi dilakukan selama 3 bulan (10 Oktober 2016-23 Januari 2017).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang yakni yang bertugas mewawancarai dan satu lagi yang diwawancarai,



percakapan ini dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Data diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala Sekolah, guru, siswa, pustakawan, dan Kepala Perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan (20 April 2017-20 Juni 2017).

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk memperoleh data tambahan atau data perbandingan untuk memperkuat penelitian, berupa dokumentasi laporan. Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang sekolah yang dijadikan tempat meneliti, juga bagaimana implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMAN 2 Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi serta untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti itu sendiri yang berperan langsung dalam lokasi penelitian.

Instrumen penelitian yaitu alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan efisien. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Peneliti

Peneliti mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:306) peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,



menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

b. Pedoman Wawancara

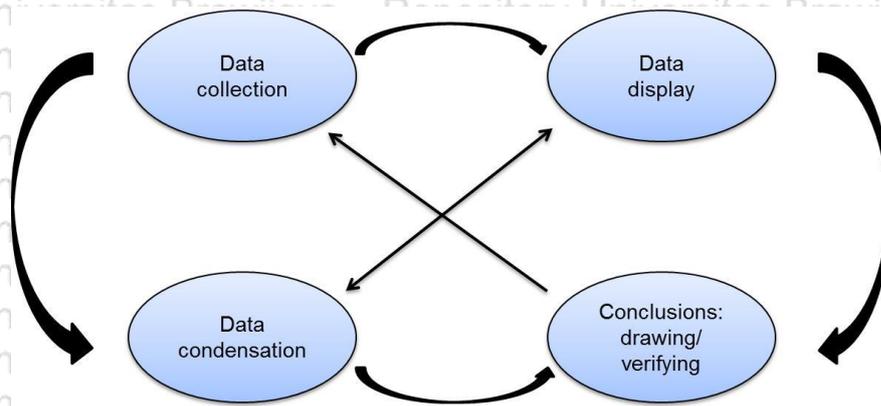
Wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya disebut dengan pedoman wawancara yang digunakan untuk menyusun pertanyaan yang jelas dan terarah.

c. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang yaitu meliputi catatan lapangan (*field note*) dalam wawancara dan alat pendokumentasian. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model interaktif. Adapun analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus, berulang-ulang datanya jenuh. Komponen dalam analisis data, yaitu: Data Display (*Penyajian Data*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penarikan Kesimpulan (*drawing and verification conclusions*), menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling terkait (Miles, Huberman, Saldana, 2014) seperti komponen pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Analisis Komponen Interaktif
 Sumber: Milles, Huberman, Saldana (2014)

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah pengorganisasian ataupun penyatuan informasi. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, Huberman, Saldana, 2014). Dengan melihat penyajian data yang diperoleh, peneliti akan mudah memahami, menganalisis obyek di lapangan serta mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dalam penyajian data tersebut.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, dan mengatur data sedemikian dengan cara menarik kesimpulan dan verifikasi.

Proses kondensasi dilakukan setelah penelitian mendapatkan hasil di lapangan dengan cara observasi.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verifying*)

Analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles, Huberman, Saldana, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Pada analisis kualitatif perlu

didokumentasikan dengan baik, karena membantu kita dalam memahami lebih jelas yang terjadi ketika menganalisis data dari lapangan (Miles, Huberman, Saldan, 2014).

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Strategi dalam teknik triangulasi adalah dengan cara pencocokan pola dan menggunakan beberapa sumber data. Adapun jenis pengukuran triangulasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Sumber data (orang, waktu, dan tempat)
2. Metode (observasi, wawancara, dan dokumen)
3. Peneliti
4. Teori (Denzin's sebagaimana dikutip Miles, Huberman, Saldana, 2014)

Langkah-langkah dalam pengukuran triangulasi, sebagai berikut: (a) triangulasi menggunakan sumber data adalah dengan cara mengamati subyek yang diteliti dan peristiwa catatan di lapangan; (b) triangulasi menggunakan metode adalah dengan cara tanggapan narasumber terhadap pelaksanaan GLS; (c) triangulasi peneliti, yaitu menganalisis semua kejadian di lapangan dan mengelola dari berbagai sumber yang ada; (d) triangulasi teori, yaitu menggunakan teori dan literatur penelitian yang relevan dalam bidangnya masing-masing. Tujuan memilih teknik triangulasi karena memiliki fokus dan kekuatan yang berbeda. Sehingga sumber data yang diperoleh dari setiap teknik dapat saling melengkapi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMAN 2 Malang

1. Profil SMAN 2 Malang

SMA Negeri 2 Malang berlokasi di Jalan Laksamana Martadinata 84

Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Sekolah dengan luas lahan 7.500 m² dengan luas halaman/tautaman 298 m² dan luas bangunan 6.902 m² yang telah dipagar penuh. Presentase lahan hijau sebesar

4% di Tahun 2014 meningkat menjadi 10% di Tahun 2015. Lahan hijau yang masih kecil tidak menyurutkan semangat warga SMA Negeri 2 Malang untuk menjadi sekolah sehat. Selain lahan hijau, SMA Negeri 2 Malang membudidayakan tanaman buah dan sayur dalam pot yang disebut Tabulampot.



Gambar 5. Peta SMAN 2 Malang

Sumber:

Citra Satelit SMAN 2 Malang menunjukkan SMAN 2 Malang terletak di jalan raya lintas Provinsi yang dikelilingi oleh perkampungan padat penduduk dan salah satu pusat ekonomi di kota Malang. Oleh sebab itu, menjadikan kawasan yang ramai dan sibuk dengan hiruk pikuk kehidupan maka dibutuhkan lingkungan sekolah yang sehat, asri, nyaman, dan aman.

Letak Sekolah yang berada di Pusat Kota menjadikan SMA Negeri 2 Malang menjadi sekolah yang banyak dipilih oleh masyarakat dari semua kalangan. Letak yang strategis menjadikan SMA Negeri 2 Malang dapat melaksanakan program-program sekolah Rujukan dengan maksimal dengan tujuan masyarakat dapat mengambil manfaat dari program Sekolah Rujukan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Visi dan Misi SMAN 2 Malang

a. Visi

“Mewujudkan insan yang cerdas, unggul dalam karya, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan.”

b. Misi

1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar yang kondusif, dalam lingkungan sekolah yang aman, tertib, disiplin, bersih, indah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mewujudkan insan yang unggul, berakhlak mulia dan mandiri.
3. Mendukung warga sekolah untuk berkarya dan berprestasi
4. Mewujudkan warga sekolah yang sejahtera, lahir dan batin.
5. Meningkatkan potensi warga sekolah, menjadi insan yang beriman

dan bertaqwa.

6. Menciptakan hubungan yang harmonis, demokratis, dan berpikir kritis antarwarga dan lingkungan sekolah.
7. Melaksanakan manajemen sekolah yang tertib dan transparan.
8. Menjalin hubungan antarwarga dan lingkungan sekolah yang dilandasi akhlak mulia.
9. Menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan lembaga atau instansi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
10. Meningkatkan kerja sama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
11. Meningkatkan kepedulian atau kecintaan warga sekolah terhadap lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi kerusakan lingkungan, dan melindungi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar.

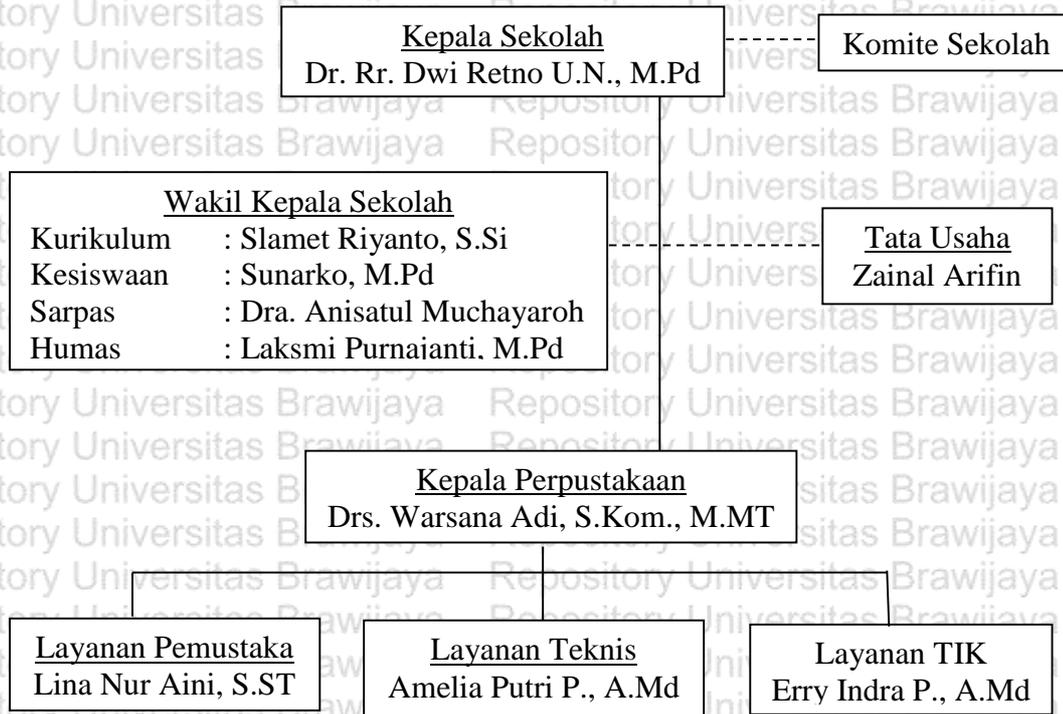
3. Tujuan SMAN 2 Malang

- a. Tercapainya manajemen partisipatif sebagai wujud dari pelaksanaan MBS.
- b. Tercapainya implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan sistem penilaiannya, merintis KTSP dengan sistem SKS dalam rangka menuju Sekolah Standar Nasional (SSN).
- c. Tercapainya kegiatan belajar mengajar yang efektif, kreatif dan menyenangkan bagi guru dan siswa.
- d. Tercapainya peningkatan rata-rata kelas rapor kelas X, XI, dan XII.
- e. Tercapainya peningkatan kemampuan komunikasi berbahasa Inggris.

- f. Tercapainya peningkatan keterampilan komputer.
- g. Tercapainya peningkatan keterampilan praktikum IPA.
- h. Tercapainya peningkatan kedisiplinan siswa.
- i. Tercapainya pengembangan kreatifitas siswa dalam bidang-bidang Penelitian Ilmiah Remaja, Olimpiade, Seni, Olahraga, Sosial dan keagamaan.
- j. Tercapainya Peningkatan pelaksanaan kegiatan 9 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan, Keterbukaan, Keteladanan).
- k. Tercapainya peningkatan kuatintas dan kualitas fasilitasatausarana pembelajaran di sekolah.
- l. Tercapainya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SMPTN dan SBMPTN serta diterima di sekolah kedinasan.
- m. Tercapainya peningkatan dan pengembangan wawasan bagi warga sekolah dalam rangka pengembangan kultur sekolah yang menyenangkan, menghasilkan dan mencerdaskan melalui simposium, lokakarya, dan studi banding.
- n. Tercapainya internalisasi budaya tata krama kepada warga sekolah yang tercermin budaya 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
- o. Tercapainya kepedulian warga sekolah dan *stakeholder* manajemen sekolah yang berbudaya lingkungan.
- p. Tercapainya peningkatan kerja sama dengan institusi lain.

- q. Tercapainya peningkatan iman dan taqwa bagi siswa, guru dan karyawan.
- r. Tercapainya peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan secara lahir batin.

4. Struktur Organisasi



Gambar 6. Struktur Organisasi SMAN 2 Malang

Sumber: SMAN 2 Malang, 2017

B. Penyajian Data

1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran

Implementasi kebijakan merupakan salah satu kebijakan yang paling penting, bahkan dapat dikatakan krusial sebaik apapun kebijakan yang telah dirancang, apabila tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan baik implementasinya maka kebijakan yang dibuat akan menjadi sia-sia. Sehingga

apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan dan jalan menuju tujuan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan menjadi sah atau dapat diterima atau dilaksanakan apabila telah menjadi suatu perundangan. Dalam hal ini, kita mengenal Undang-undang, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dll. Salah satu Peraturan Menteri yang telah dibuat dan disahkan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu upaya penumbuhan budi pekerti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai materi baca yang berisikan nilai-nilai moral.

Kegiatan membaca dilakukan 15 menit setiap hari pada saat sebelum pelajaran dimulai. Hal ini merupakan salah satu dasar dalam tahap pembiasaan sebelum masuk ke tahap pengembangan dan pembelajaran. Kegiatan membaca ini ada dalam semua komponen literasi yang telah dijelaskan pada bab II. Namun saat ini SMAN 2 Malang masih pada komponen literasi dasar dan literasi perpustakaan.

a. Literasi Dasar

Literasi dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Pada

literasi dasar ini dilakukan beberapa tahap, dimana tahapan ini dilakukan secara berjenjang.

1) Tahap pembiasaan

Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015). Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Dalam kegiatan tersebut peserta didik diwajibkan untuk membaca buku non teks. Membaca tentu sangat banyak memberikan dampak positif. Dampak positif dapat diperoleh apabila mampu membaca dan memahaminya dengan efektif. Siswa SMAN 2 Malang Reza menjelaskan bahwa:

“Jarang membaca dikelas mbak karena malas. Jika ada yang tidak membaca juga tidak ketahuan oleh guru. Dan guru tidak memantau siswa saat kegiatan tersebut berlangsung. Ada jurnal harian tapi jarang saya mengisi karena tidak dicek sama gurunya dan gak dijadikan sebagai penilaian akademik” (wawancara, 24 April 2017 pukul 10.00 WIB).

Petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua siswa memperhatikan kegiatan tersebut dan tenaga pendidik kurang berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.

Berbeda dengan Andiza siswa kelas X menjelaskan bahwa:

“Efektif mbak, karena menambah pengetahuan. Karena anak jaman sekarang itu minat bacanya kurang mbak. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita diharuskan untuk membaca, mau tidak mau harus membaca. Semester 1 bukunya ditentukan seperti novel laskar



pelangi. Untuk gurunya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena setiap berakhirnya kegiatan membaca kita masing-masing siswa mempunyai jurnal harian yang harus di tanda tangani guru untuk penilaian akademik yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia” (wawancara, 24 April 2017 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan siswa kelas X tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan GLS tersebut terimplementasikan dengan baik.

Harfina sebagai siswa kelas XI menjelaskan bahwa:

“Menurut saya kalau buat rutinan efektif mbak tetapi waktunya kurang efektif. Kalau mau menyelesaikan satu buku kan setiap semester dibatasi, ditentukan bukunya apa saja dan biasanya teman-teman hanya membaca diawal saja. Ada jurnal harian juga mbak dikasih oleh pihak sekolah. Dan kita juga membuat rangkuman dari buku bacaan yang kita baca sebagai penilaian akademik mata pelajaran bahasa Indonesia” (wawancara, 8 Mei 2107 pukul 09.30 WIB).

Senada dengan Harfina, Ramanda kelas XI menjelaskan bahwa:

“Efektif mbak. Meningkatkan untuk kegiatan membaca buku. Biasanya hanya membaca buku tentang materi-materi sekolah, dengan adanya kegiatan ini bisa mengetahui jenis-jenis buku seperti novel dan dapat menambah wawasan. Setiap anak juga mempunyai jurnal harian” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 09.30 WIB).

Dua petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik dan sebagaimana dengan Gerakan Literasi

Sekolah (GLS) yaitu 15 menit membaca sebelum mata pelajaran dimulai sehingga dikatakan implementasi GLS berjalan dengan baik.

2) Tahap pengembangan

Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan Anderson & Krathwol (2001) dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016:28).

Siswi SMAN 2 Malang, saudara Reza kelas X menjelaskan bahwa:

“Ada mbak, tapi setahu saya tidak digunakan sebagai penilaian akademik mata pelajaran bahasa Indonesia. Terserah kita mau membaca dan merangkum menjadi berapa halaman” (Wawancara, 24 April 2017 pukul 10.00 WIB).

Petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 15 menit membaca sebelum mata pelajaran dimulai tidak dilaksanakan dengan baik.

Berbeda dengan Andiza yang menyatakan,

“Ada mbak, hasil rangkuman tersebut nantinya akan dilihat dan dikumpulkan sebagai penilaian akademik mata pelajaran bahasa Indonesia” (wawancara, 24 April 2017 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan Andiza siswa kelas X tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai berjalan dengan baik dan sesuai tujuan GLS.

Kepala perpustakaan juga menyatakan hal senada,

“Jadi ada hasil rangkuman yang dianalisis oleh siswa dan hasil rangkuman tersebut ditanda tangani oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Satu semester membuat satu analisis buku dari tiga buku non pelajaran” (wawancara, 24 April 2017 pukul 11.30 WIB).



Wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan sebagaimana tujuan khusus GLS dan diimplementasikan dengan tepat.

Begitu pula yang diungkapkan Sari siswa kelas XI yang menyatakan,

“Hasil dari rangkuman dari buku bacaan yang kita baca itu dikumpulkan kepada guru bahasa Indonesia mbak. Soalnya hasil dari rangkuman kita dinilai untuk nantinya menjadi penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia” (wawancara, 24 April 2017 pukul 10.30 WIB).

Ramanda siswa kelas XI menyatakan hal senada,

“Ada hasil rangkuman mbak. Kita merangkum hasil bacaan tersebut sesuai dengan halaman yang telah dibaca. Nantinya diberi paraf dan dikumpulkan sebagai penilaian akademik” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.00 WIB).

Kutipan wawancara dengan siswa diatas menunjukkan bahwa kegiatan GLS membaca 15 menit buku nonpelajaran sebelum pelajaran dimulai terimplementasi dengan baik.

3) Tahap pembelajaran

Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran.

Kepala perpustakaan SMAN 2 Malang, Bapak Warsana menyampaikan bahwa kegiatan GLS terlaksanan dengan baik,



“Kalau untuk output dari kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu nantinya akan lomba dari hasil rangkuman anak-anak itu tadi. Karya dari anak-anak itu tadi dijadikan satu untuk kegiatan tersebut. Terus juga pojok buku, jadi setiap kelas nantinya menyediakan pustaka kecil disudut kelas masing-masing” (wawancara, 18 April 2017 pukul 11.00 WIB).

Petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan-tahapan yang ada dalam kegiatan GLS tersebut telah terimplementasi dengan baik. Sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pustakawan SMAN 2 Malang juga menyatakan hal yang senada,

“Jadi output dari kegiatan tersebut, nantinya hasil rangkuman siswa dijadikan satu dan ikut serta dalam lomba antar rujukan seperti cerpen, menulis resensi buku, dan lomba pojok buku” (wawancara, 19 April 2017 pukul 10.00 WIB).

Guru bahasa Indonesia menyatakan,

“Ada outputnya mbak. Jadi kita mengadakan lomba antar rujukan. mulai dari penumbuhan budi pekerti, pengembangan kewirausahaan, pojok buku, dan penulisan cerpen. Yang nantinya akan menjadi penilaian sendiri bagi setiap siswanya” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.00 WIB).

Kedua petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa program Gerakan Literasi Sekolah di SMAN 2 Malang terimplementasi dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti yang diperkuat dengan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai.

b. Literasi Perpustakaan

Literasi perpustakaan yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan literasi perpustakaan. Pemahaman tentang keberadaan

perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* (DDC) sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Pada literasi perpustakaan ini dilakukan beberapa tahap, dimana tahapan ini dilakukan secara berjenjang.

1) Tahap Pembiasaan

Dalam praktiknya perpustakaan sekolah menyelenggarakan kegiatan penunjang keterampilan literasi informasi bagi peserta didik. Pada tahap pembiasaan ini peserta didik diharapkan mencari bahan pustaka yang diminati untuk kegiatan membaca 15 menit. Dalam kegiatan tersebut peserta didik tidak diwajibkan membawa buku bacaan non pelajaran.

Peserta didik dapat meminjam buku bacaan non pelajaran di perpustakaan sekolah. Siswa SMAN 2 Malang, Reza menjelaskan bahwa:

“Kalau saya pinjam ke perpustakaan mbak. Nanti kalau sudah membaca 15 menit saya kembalikan. Soalnya saya dirumah gak punya buku non pelajaran mbak. Jadi ya setiap harinya saya pinjam ke perpustakaan” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.30 WIB).

Berbeda dengan Andiza siswa kelas X menyatakan bahwa:

“Setiap harinya saya membawa dari rumah mbak. Soalnya kalau ditaruh di sudut baca kelas biasanya itu hilang mbak. Jadi setiap



hari saya membawa dari rumah. Karna merupakan tanggung jawab masing-masing setiap bukunya itu mbak. Untuk judulnya terserah mbak tetapi genrenya ditentukan oleh sekolah” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB).

Petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua siswa meminjam buku di perpustakaan dalam kegiatan GLS tersebut.

Karena dalam kegiatan tersebut sekolah tidak mewajibkan siswa untuk meminjam diperpustakaan dan sebaliknya.

Harfina sebagai siswa kelas XI menjelaskan bahwa:

“Untuk bukunya saya membawa sendiri mbak. Soalnya judulnya terserah tidak ditentukan dari sekolah hanya jenis bukunya saja yang ditentukan. Pinjam di perpustakaan juga bisa mbak, bisa memakai kartu tanda pelajar” (wawancara, 16 Mei 2017 pukul 10.00 WIB).

Senada dengan yang dijelaskan oleh Bapak Warsana bahwa:

“Siswa diperbolehkan membawa buku sendiri dan juga bisa meminjam diperpustakaan. Tetapi genrenya sudah ditentukan, untuk judul terserah setiap siswa ingin membaca judul apa.kalau untuk pojok baca kelas itu merupakan tanggung jawab siswa dikelas masing-masing” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB).

Dua petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa literasi tersebut telah sesuai dengan kegiatan GLS yang memperkuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 yang contoh kegiatan pada tahap pembiasaan adalah mencari bahan pustaka yang diminati untuk kegiatan membaca 15 menit.

2) Tahap Pengembangan

Terdapat beberapa kegiatan tindak lanjut yang dilakukan. Pada tahap pengembangan ini, literasi perpustakaan memiliki contoh kegiatan yaitu



menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang bacaan.

Andiza siswa kelas X menyatakan bahwa:

“kalau ke perpustakaan tidak hanya pada saat guru memberikan tugas ataupun pada saat pelajaran tertentu guru mengajak belajar bersama di perpustakaan. tetapi biasa saya pada saat jam istirahat atau pada saat jam kosong pelajaran, saya ke perpustakaan. dan sering juga berdiskusi tentang buku bacaan yang saya baca dengan teman-teman” (wawancara, 3 Mei 2017 pukul 10.30 WIB).

Berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Harfina sebagai siswa kelas

XI menjelaskan bahwa:

“Saya datang ke perpustakaan biasanya kalau ada tugas dari guru saja mbak. Jadi jarang ke perpustakaan kalau gak ada arahan dari guru untuk meminjam buku atau mendapatkan tugas yang mengharuskan ke perpustakaan. Apabila ada diskusi saja, saya jarang di perpustakaan. lebih senang di luar perpustakaan” (wawancara 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB).

Petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua siswa

memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai sumber informasi. Karena siswa mengunjungi perpustakaan hanya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru.

Sari siswa kelas XI menjelaskan bahwa:

“Iya mbak, saya ke perpustakaan kalau pas jam pulang sekolah. Soalnya kalau pas pelajaran lebih banyak dikelas. Terus kalau pada sat jam istirahat itu waktunya cuma sebentar hanya untuk makan. Dan biasanya datang ke perpustakaan apabila guru memberikan tugas tambahan” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.00 WIB).

Petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa siswa di SMAN 2

Malang kurang dapat menggunakan perpustakaan yang ada sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang bacaan maupun tugas. Maka



dengan disimpulkan bahwa pada tahap pengembangan pada literasi perpustakaan kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 yang salah satu kegiatan di dalam GLS adalah kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk dapat memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi untuk berdiskusi.

3) Tahap Pembelajaran

Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran ini bertujuan untuk mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif (verbal, tulisan, visual, digital) melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan dan buku pelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam tahap pembelajaran, semua kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan tindak lanjut di tahap pengembangan dapat diteruskan sebagai bagian dari pembelajaran dan dinilai secara akademik. Perpustakaan seklah menyediakan beragam buku bacaan (buku-buku nonpelajaran:fiksi dan nonfiksi) yang diperlukan peserta didik untuk memperluas pengetahuannya dalam pelajaran tertentu.

Bapak Warsana menjelaskan bahwa:

“Selama ini siswa diberi tugas belajar di perpustakaan dengan arahan dari guru. Jadi kurang ada inisiatif dari siswa” (wawancara, 1 Juni 2017 pukul 09.00 WIB).

Senada dengan penjelasan pustakawan bahwa:

“Siswa mengunjungi perpustakaan lebih banyak saat mendapatkan tugas dari guru atau diskusi dengan guru tentang pelajaran. Terus siswa lebih banyak yang meminjam buku



daripada membaca buku di perpustakaan” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB).

Dua petikan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan literasi perpustakaan di SMAN 2 Malang belum sesuai dengan Panduan GLS di Sekolah Menengah Atas yang memberikan arahan bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan, karena siswa kurang memanfaatkan perpustakaan sebaik mungkin sebagai sumber informasi.

c. Kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan di SMAN 2 Malang

1) Literasi Budaya Membaca

Membaca buku selama 15 menit merupakan budaya yang sudah dilaksanakan. Buku yang dibaca selama 15 menit sebelum pelajaran

dimulai adalah selain buku pelajaran yaitu karya fiksi atau karya sastra.

Hal ini penting dilakukan karena mendorong kebiasaan membaca bagi peserta didik sebagai langkah awal pembiasaan. Buku-buku fiksi meliputi

novel, kumpulan puisi dan kumpulan cerita pendek. Hal ini dilakukan sebagai motivasi terhadap peserta didik terutama pada budaya barat.

Target budaya membaca dalam semester pertama 3 buku sastra bervariasi: novel, kumpulan cerpen, dan kumpulan puisi. Semester kedua

3 buku umum: ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, bahasa, sosial, ekonomi, dan humaniora. Semester ketiga 3 buku teori dan ilmu sastra:

apresiasai, resensi, kritik, dan esai sastra. Semester keempat 3 buku biografi tokoh-tokoh ternama atau kharismatik Indonesia.

Semester kelima 3 buku biografi tokoh-tokoh ternama atau kharismatik dunia. Semester keenam 3 buku teori drama, naskah drama,



skenario film. Target membaca 18 judul fiksi dan non-fiksi dengan perbandingan berimbang sesuai dalam silabus Kurikulum 2013 (dalam pembelajaran berbahasa dan bersastra, dikembangkan budaya membaca dan menulis secara terpadu. Dalam satu tahun pelajaran peserta didik termotivasi agar dapat membaca paling sedikit 8 buku (5 buku sastra dan 3 buku non sastra) sehingga peserta didik menyelesaikan pada jenjang SMA membaca paling sedikit 18 judul buku.

Saat ini SMAN 2 Malang telah melaksanakan GLS selama 2 semester. Peserta didik diwajibkan membaca 3 buku dalam satu semester. Setelah membaca satu buku, peserta didik berkewajiban membuat ringkasan atau sinopsis sebagai hasil kegiatan literasi budaya membaca pada setiap akhir.

Selain itu, peserta didik membuat catatan harian dalam buku besar (jurnal) yang berupa batas membaca, catatan penting. Dalam catatan harian, guru atau pendidik menandatangani catatan yang dibuat setiap siswa pada buku harian yang dibaca dan menjadi penilaian akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia.

2) Literasi Budaya Menulis

Konsep penguatan terhadap budaya membaca adalah budaya menulis. Pada kegiatan literasi menulis disesuaikan dengan hasil budaya membaca sebagai berikut:

- a. Kegiatan menulis semester pertama berupa teks ulasan atau resensi. Teks ulasan didasarkan pada target dalam semester pertama, yaitu: novel, kumpulan cerpen, dan kumpulan puisi.



b. Kegiatan menulis semester kedua berupa artikel ilmiah populer.

Dengan demikian artikel didasarkan atau sesuai pada target dalam semester kedua buku umum, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, bahasa, sosial, ekonomi, dan humaniora. Pada kegiatan tersebut diarahkan pada penyesuaian peminatan (Peminatan Bahasa dan Budaya diarahkan ke artikel tentang Bahasa dan Budaya, Peminatan matematika dan ilmu pengetahuan diarahkan ke artikel tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial diarahkan ke artikel pengetahuan sosial).

c. Kegiatan menulis pada semester ketiga berupa cerita pendek atau cerpen. Karya cerpen didasarkan atau disesuaikan pada target dalam semester ketiga yaitu buku teori dan ilmu sastra, apresiasi, kritik, dan esai sastra.

d. Kegiatan menulis pada semester keempat berupa karya kumpulan puisi (minimal 5 puisi) dengan inspirasi tokoh nasional yang diidolakan. Dengan demikian karya drama atau skenario film atau film pendek didasarkan pada target dalam semester keempat yaitu buku-buku biografi tokoh-tokoh ternama atau kharismatik Indonesia.

e. Kegiatan menulis pada semester kelima berupa karya drama atau skenario film pendek atau bersumber inspirasi tokoh dunia.

Dengan demikian karya drama atau skenario film-film pendek



didasarkan pada target dalam semester kelima yaitu buku-buku biografi tokoh-tokoh ternama atau kharismatik dunia.

f. Kegiatan menulis pada semester keenam berupa karya kritik dan esai sastra. Dengan demikian karya kritik atau esai sastra didasarkan pada target dalam semester keenam yaitu buku teori drama, naskah drama, skenario film.

g. Dokumentasi, penerbitan, dan penghargaan dalam bentuk buku kumpulan resensi atau teks ulasan, buku kumpulan artikel populer, buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, buku kumpulan naskah drama, buku kumpulan antologi kritik dan esai sastra. Penerbitan karya-karya oleh penerbit yang sudah memiliki *International Standard Book Number* (ISBN). Penghargaan berhubungan dengan harga buku kumpulan karya siswa dengan kontribusi biaya penerbitan ditanggung bersama atau dibebankan pada sponsor untuk 1000 eksemplar penerbitan awal.

h. Budaya menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Kewajiban menulis karya ilmiah setiap tahun satu karya yang dikoordinir oleh tim penulisan karya ilmiah sekolah. Dari kegiatan penulisan karya ilmiah yang dilakukan peserta didik sangat mendukung penilaian lomba perpustakaan dan sekaligus inilah yang mendapatkan nilai lebih dari visitasi perpustakaan tingkat Provinsi Jawa Timur.

3) Literasi atau Budaya Menulis Bagi Pendidik atau Guru



- a. Budaya menulis yang dilakukan guru berupa karya ilmiah dalam bentuk penelitian, artikel ilmiah dan populer yang diterbitkan di jurnal atau media masa lain.
- b. Penulisan buku bahan ajar tambahan sebagai referensi penguatan bagi siswa yang dilakukan tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mengembangkan konsep keilmuan setiap mata pelajaran dengan mempertimbangkan acuan silabus atau KD (Kompetensi Dasar) dan ujian nasional sehingga merupakan buku penunjang peningkatan mutu yang berlaku selama tiga tahun.
- c. Penerbitan buku diterbitkan yang mempunyai *International Standard Book Number* (ISBN) penerbit Lintang Aksara Group dengan judul “Menepis Dingin Perahu Berlabuh”, dapat dilakukan dengan iuran siswa atau sumber dana lainataudibebankan pada sponsor untuk 1000 eksemplar penerbitan awal.
- d. Penerbitan Tabloid Bahtera yang mempunyai *International Standard Serial Number* (ISSN) memuat karya tulis peserta didik atau siswa dan guru.

d. Lomba Kegiatan Literasi di SMAN 2 Malang

1) Lomba perpustakaan kelas dan pojok buku

Lomba ini memadukan perpustakaan kelas yang melengkapi dengan tatanan di semua sudut kelas. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi setiap kelas terdapat rak buku atau almari yang memenuhi pandangan



ideal ruang kelas yang dirancang sedemikian rupa. Pada pojok buku terdapat administrasi sirkulasi setiap pembaca buku. Koleksi buku bervariasi seperti budaya, alam, humaniora, teknologi, rasional, dan artistik. Pada lomba ini diikuti setiap kelas di SMAN 2 Malang.

2) Lomba Mengulas Karya Sastra (LMKS)

Mengulas karya sastra merupakan lomba sebagai perwujudan dari materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu resensi, artikel, dan kritik. Setiap peserta wajib memilih satu judul karya sastra yang telah ditentukan oleh panitia. Karya yang diulas meliputi novel berjudul (Pada Sebuah Kapal, Layar Terkembang, Ronggeng Dukuh Paruk, Laskar Pelangi, dan Saman), kumpulan cerpen yang berjudul (Godlob, Sampah Bulan Desember, Sagra, Saksi Mata, Robonya Surau Kami), dan kumpulan puisi yang berjudul (Malu Aku Jadi Orang Indonesia, O, Amuk Kapak, Kelenjar Laut, Tuhan, Suara Ibu, Menepis Dingin Perahu Berlubuh, dan Empat Kumpulan Sajak). Untuk peserta adalah siswa SMA Negeri atau Swasta kota Malang. Peserta wajib menyerahkan naskah hasil ulasan paling lambat Sabtu, 22 Oktober 2016 pukul 15.30. Hasil penilaian akan disampaikan pada hari Jum'at, 28 Oktober 2016 pukul 13.30 di SMAN 2 Malang.

3) Lomba Menulis Cerpen

Menulis cerpen merupakan proses kreatif yang perlu dikembangkan pada pendidikan menengah atas atau SMA. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan imajinasi dan kepekaan menyikapi fenomena



yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menulis cerita pendek merupakan pengembangan proses kreatif bagi peserta didik yang akan menambah wawasan tentang kondisi sosial suatu masyarakat. Setiap peserta wajib membuat satu cerita pendek dan memilih satu tema yaitu, Ketuhanan, Kemanusiaan, Sosial dan Budaya, Cinta dan Tanggung Jawab, Cinta Tanah Air atau Kebangsaan. Naskah cerpen dikumpulkan paling lambat Sabtu, 22 Oktober 2016 pukul 15.30. Untuk peserta adalah siswa SMA Negeri atau Swasta kota Malang.

4) Lomba Menulis Artikel

Artikel dibedakan menjadi 2 yaitu tulisan ilmiah teknis (murni) untuk kalangan tertentu seperti skripsi, tesis, dan disertasi, atau laporan penelitian, artikel atau makalah seminar. Tulisan ilmiah populer untuk pembaca yang lebih luas (beragam) biasanya artikel untuk koran atau majalah. Lomba penulisan artikel yang dimaksud di SMAN 2 Malang adalah tulisan ilmiah populer karena diterbitkan atau dimuat di tabloid. Materi yang dibahas bebas tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, moral, pendidikan, agama, remaja, kesehatan, psikologi, sastra, film, politik, hukum, filsafat, gender, dan lain-lain. Naskah artikel dikumpulkan paling lambat Sabtu, 22 Oktober 2016 pukul 15.30. Hasil penilaian akan disampaikan hari Jum'at, 28 Oktober 2016 pukul 13.30 Untuk peserta adalah siswa SMA Negeri atau Swasta kota Malang.



5) Menerbitkan Tabloid

Sebagai wujud dari pelaksanaan literasi, tabloid merupakan media yang dapat memfasilitasi karya guru dan peserta didik dalam mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan humaniora. SMAN 2 Malang menerbitkan judul tabloid Bahtera tentang “Budaya, Alam, Humaniora, Teknologi, Etika, Rasional, dan Artistik”. Tabloid ini berisi tentang SMAN 2 Malang dan perkembangannya, karya guru, karya siswa, karya umum, dan berbagai informasi kota Malang. Persentase materi yang bersumber dari siswa 50 persen, guru 30 persen, dan dari luar 20 persen. Direncanakan akan terbit empat kali selama satu tahun.

e. Tim Literasi SMAN 2 Malang

Ketua : Drs. Warsana Adi, S.Kom., M.MT

Sekretaris : Amelia Putri P., A.Md

Guru Bahasa Indonesia : 1. Drs. Sugiyono
2. Dra. Hermin Pujiastuti

Anggota : 1. Nurul Azizah, S.Pd
2. Heni Kristiani, S.Pd
3. Dra. Qoyimah

Peran tim literasi sekolah dalam mengembangkan kegiatan literasi sekolah mengkoordinasikan kegiatan pengembangan literasi sekolah bekerja sama dengan Kepala sekolah, pustakawan, guru kelas. Apabila sumber daya manusia memungkinkan, tim literasi sekolah dapat membentuk tim khusus yang bertugas:



1. Mengawasi, memonitor, dan memastikan kelangsungan program-program literasi sekolah
2. Membuat jaringan eksternal dengan pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan literasi sekolah
3. Pertemuan rutin untuk membahas rencana dan perkembangan kinerja program literasi sekolah
4. Mengkoordinir orang tua atau wali murid untuk mendukung fasilitas dan kelengkapan koleksi sudut baca kelas dan perpustakaan
5. Bekerja sama dengan kepala sekolah, pustakawan, guru kelas, atau dunia bisnis untuk menyelenggarakan kegiatan seperti lomba cerpen, lomba karya tulis ilmiah.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Faktor komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari sebuah implementasi kebijakan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Diharapkan informasi kebijakan yang dikomunikasikan tidak terbatas diantara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini yang menjadi *policy makers* adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan *policy implementers* dari kebijakan ini adalah

Kepala Sekolah. Penyampaian informasi menjadi urgen karena *policy implementers* harus mengetahui apa yang akan dilaksanakan, termasuk isi, maksud, serta tujuan yang diaplikasikan sebuah kebijakan. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Faktor komunikasi yang merupakan faktor pertama keberhasilan sebuah kebijakan, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1) Transmisi

Transmisi menghendaki agar kebijakan disampaikan tidak hanya disampaikan pelaksana kebijakan, namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Adanya penyaluran komunikasi yang baik tentunya menghasilkan implementasi yang baik pula. Indikator transmisi menghendaki agar informasi disampaikan selain kepada pelaksana kebijakan, juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait. Ibu Dr. Rr. Dwi Retno UN., M.Pd selaku Kepala

Sekolah SMAN 2 Malang menyatakan,

“Komunikasi yang dibangun dalam kegiatan GLS ini dilakukan dengan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini. Terutama peserta didik, guru, dan orang tua siswa. Semua kegiatan kami sosialisasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ada” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB).

Kepala Perpustakaan juga menyatakan hal yang senada,

“Umumnya komunikasi tersebut berjalan dengan baik. Dengan sosialisasi kepada tim sekolah dengan mengadakan rapat. Jadi informasi yang diterima cukup dan paham akan kegiatan yang telah disosialisasikan” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.00 WIB).

Dua kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa *policy makers* telah melakukan sosialisasi dengan cara yang baik dan mengadakan kontak

komunikasi yang cukup guna melaksanakan kegiatan tersebut.

2) Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah untuk dipahami sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 Nomor 23 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Berdasarkan peraturan tersebut salah satu kegiatan di dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai.

Hal ini menunjukkan keseriusan Kepala Sekolah selaku *policy maker* untuk menjalankan Permendikbud. Ibu Dr. Rr. Dwi Retno UN., M.Pd menyatakan,

“Sosialisasi yang sekolah lakukan tentu tidak langsung serta merta ke peserta didik. Kami mempunyai tim GLS, yang melakukan sosialisasi dengan peserta didik dengan workshop. Tim kami menjelaskan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kegiatan GLS. Informasi yang diterima cukup jelas, dibuktikan dengan peserta didik yang berantusias dalam kegiatan GLS tersebut”.
(Wawancara tanggal 8 Mei 2017)

Pernyataan ibu Dwi tersebut menjelaskan bahwa informasi yang ditransformasikan adalah jelas adanya dan tidak membuat pihak lainnya menjadi bingung atas peraturan Kemendikbud. Hingga ke peserta didik, informasi yang diperoleh cukup jelas dan dapat dilaksanakan.

Sama halnya dengan pernyataan kepala sekolah. Bapak Warsana

menjelaskan bahwa:

“Iya jelas mbak. Disitu sudah ada kebijakan tertulis apa yang harus dilakukan (wawancara, 27 April 2017 pukul 11.00 WIB)”.

Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar cukup jelas terkait kegiatan GLS tersebut dan melakukan sosialisasi yang cukup baik. Dan peserta didik sebagai implemmentator faham betul apa yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan tersebut yang sesuai dengan peraturan.

3) Konsistensi

Dimensi terakhir dari variabel komunikasi model implementasi kebijakan Edward III (1980) adalah konsisten informasi. Artinya, informasi yang didapat target group adalah informasi yang utuh yang disampaikan *policy maker* terhadap *polycyc implementer*. Kepala sekolah menyatakan bahwa komunikasi yang dibangun oleh *policy maker* hingga target group berjalan dengan baik karena adanya kesepahaman untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Komunikasi yang kami bangun bertujuan untuk mengakselerasi kebijakan yang telah ada. Sering diadakan sosialisasi kepada tenaga pendidik maupu peserta didik. Biasanya kami juga sering mengundang pemateri dari luar sekolah untuk sosialisasi tentang GLS. Maupun dari pihak dinas pendidikan” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.30 WIB).

Kutipan wawancara dengan kepala sekolah SMAN 2 Malang menunjukkan bahwa informasi yang diberikan sudah cukup konsisten.

Informasi yang diteruskan diupayakan tetap utuh.

Kepala Perpustakaan, bapak Suwarsana mengungkapkan bahwa informasi yang didapat terjaga konsistennya.

“Sama mbak, gak mungkin kami mengarang itu sudah ada kebijakan. Buktinya sudah disosialisasi dan berjalan dengan lancar. Dan peserta didik mau mengikuti kegiatan tersebut dengan minat masing-masing tanpa ada paksaan”. (wawancara, 27 April 2017 pukul 10.30 WIB)

Petikan wawancara terakhir diatas, mengindikasikan bahwa adanya informasi yang konsisten dari awal ke akhir, sehingga tidak adanya kesimpangsiuran dalam informasi ini. Informasi yang diteruskan diupayakan tetap utuh hingga nantinya disalurkan kepada peserta didik.

b. Sumber daya manusia

Selain informasi yang ditransformasikan harus jelas dan konsisten, kesuksesan implementasi sebuah kebijakan memerlukan ketersediaan sumber-sumber yang memadai. Sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Namun peneliti mengambil satu jenis sumber daya yang paling *urgent* dibanding sumber daya yang lain, yakni sumber daya manusia.

Implementasi kebijakan yang sudah dibuat tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia implementasi akan berjalan lambat.

Berdasarkan fokus dalam penelitian ini, maka sumber daya manusia yang dimaksud adalah Kepala Sekolah SMAN 2 Malang karena merupakan eksekutor kebijakan di lapangan. Berikut daftar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan tenaga pendidik SMAN 2 Malang

Pendidikan	GT PNS		GTT		Jumlah
	L	P	L	P	
S-3	-	1	-	-	1
S-2	4	6	2	1	13
S-1	10	29	5	12	56
JUMLAH	14	36	7	13	70

Sumber: SMAN 2 Malang, 2016

Berdasarkan pada tabel, kondisi sumber daya manusia tingkat pendidikan tenaga pendidik di SMAN 2 Malang secara kuantitas sudah memadai. Dilihat dari tingkat pendidikannya S1 sebanyak 56 orang, S2 sebanyak 13 orang, S3 sebanyak 1 orang. Pada sumber daya manusia faktor tingkat pendidikan inilah yang menjadikan implementasi GLS menjadi lebih baik. Meskipun demikian, untuk pembagian tugas pada masing-masing tim berdasarkan pada kapasitas yang dimiliki.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan tenaga kependidikan SMAN 2 Malang

Pendidikan	Pegawai PNS		Pegawai Honorer		Jumlah
	L	P	L	P	
S-1	-	-	1	3	4
D-3atauD-4	-	-	7	1	8
D-1atauD-2	-	-	3	1	4
SMA	1	-	2	-	3
<SMP	-	-	10	-	10
JUMLAH	1	-	23	5	29

Sumber: SMAN 2 Malang, 2016

Berdasarkan tabel, sumber daya manusia tenaga kependidikan di SMAN 2 Malang dilihat dari tingkat pendidikan belum memadai dengan masih terdapatnya tenaga kependidikan dengan tingkat pendidikan dibawah SMP. Jumlah pegawai dengan pendidikan dibawah SMP sebanyak 10 orang, SMA sebanyak 3 orang, D1atauD2 sebanyak 4 orang, dan D3atauD4 sebanyak 8 orang.

Faktor tingkat pendidikan tenaga pendidik inilah yang menjadikan SMAN 2 Malang lebih hidup dan aktif. Tim kegiatan GLS mampu melakukan koordinasi yang baik, sehingga menghasilkan komunikasi dan disposisi yang baik sebagaimana peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya.

Sumberdaya manusia yang merupakan salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan model Edward III (1980) dan menurut peneliti menjadi paling penting karena sumber daya manusia menentukan jalannya sebuah kebijakan. Hal ini juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 malang Ibu Dr. Rr. Dwi Retno UN., M.Pd menjelaskan bahwa:

“Upaya dalam pelaksanaan GLS diadakannya pengawasan, sosialisasi. Sumber daya manusia di SMAN 2 Malang telah memadai dan cukup

untuk membentuk tim GLS” (Wawancara, 8 Mei 2017 pukul 10.30 WIB).

Sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Malang, Kepala Perpustakaan Bapak Suwarsana menjelaskan bahwa:

“Sumber daya manusia SMAN 2 Malang sudah memadai secara kuantitas dan kualitas dan kegiatan GLS tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Dengan hal tersebut, saat ini SMAN 2 Malang menjadi sekolah rujukan se-kota Malang” (Wawancara, 24 April 2017 pukul 11.00 WIB).

Warga sekolah telah memahami pelaksanaan kegiatan GLS tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik sebagai *implementator* memiliki pemahaman yang benar tentang pelaksanaan GLS.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di SMAN 2 Malang sudah memadai secara kuantitas dan kualitas, meskipun terdapat beberapa tenaga kependidikan yang masih rendah tingkat pendidikannya.

c. Disposisi

Disposisi dijelaskan sebagai kemauan, kemampuan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi bisa jadi watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementator* yang didalamnya mencakup komitmen dan kejujuran. Apabila *implementator* memiliki disposisi yang baik maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan baik pula. Edward III (1980) beranggapan bahwa disposisi sangatlah berpengaruh pada tingkat keberhasilan

pelaksanaan kebijakan.

Sikap para pelaksana kebijakan di SMAN 2 Malang memiliki keinginan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam implementasi tersebut. Kepala sekolah SMAN 2 Malang Ibu Dr. Rr. Dwi Retno UN., M.Pd menjelaskan bahwa:

“Untuk sikap para pelaksana terhadap pelaksanaan suatu kebijakan menginginkan bagaimana cara GLS tersebut berjalan sesuai tujuan. Dengan keinginan tersebut jadi ya melakukan sosialisasi” (wawancara, 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB).

Senada dengan pernyataan Kepala Perpustakaan memberikan pendapat,

“Mendukung dengan adanya GLS. Dengan menyediakan sarana prasana untuk menunjang kegiatan tersebut. Berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan baik” (wawancara, 24 April 2017 pukul 10.30 WIB).

Petikan wawancara tersebut menjelaskan bahwa sikap para pelaksana adalah eksekutor di lapangan yang nantinya menerapkan peraturan menteri kepada peserta didik.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi diperlukan untuk mengatur sumber daya manusia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Meskipun sumber-sumber daya memadai dan implementator mengetahui dan mendukung implementasi kebijakan namun implementasi kebijakan tersebut tidak efektif tanpa pendelegasian kewenangan yang jelas dan efektif. Struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) karena dalam implementasi tersebut melibatkan banyak *stakeholder* sehingga diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi. Struktur birokrasi memberikan kejelasan

pembagian wewenang, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan GLS di SMAN 2 Malang. Dengan adanya struktur birokrasi menghindari tumpang tindih kewenangan, program dan kegiatan yang terkait.

Dalam kaitannya dengan implementasi GLS di SMAN 2 Malang merupakan kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik). Kepala sekolah SMAN 2 Malang Ibu Dr. Rr. Dwi Retno UN., M.Pd menjelaskan bahwa:

“Struktur birokrasi dalam kegiatan ini terdapat tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang formal, dan standar operasional prosedur yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan GLS. Jadi dalam melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing” (wawancara, 8 Mei 2017, pukul 10.30 WIB).

Struktur birokrasi dalam implementasi GLS di SMAN 2 Malang yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apabila tidak sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing akan menyebabkan kegagalan implementasi. Adanya perubahan kebijakan juga memberikan kebingungan mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memicu tidak kondusifnya hubungan komunikasi antar pelaku kebijakan.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran

Kegiatan literasi ada dalam 5 komponen literasi yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.

Identifikasi masalah didalam pelaksanaan GLS di SMAN 2 Malang yaitu masih melaksanakan dua komponen literasi yaitu literasi dasar dan perpustakaan.

a. Literasi Dasar

Kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi (Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 2016:8). Setiap siswa memiliki kemampuan tersebut ada tujuan tersendiri. Membaca dengan tujuan tertentu lebih memahami maksud dan tujuan membaca dibanding dengan yang hanya sekedar membaca tanpa tujuan. Pada kegiatan membaca disekolah guru diharapkan dapat menyusun tujuan membaca dengan membuat tujuan khusus yang dapat menyesuaikan dengan tujuan membaca siswa, sesuai dengan tujuan membaca pada umumnya yaitu agar anak mampu membaca dan memahami setiap teks pendek dengan lancar. Dengan kegiatan membaca

siswa memiliki tujuan dan maksud dari membaca yaitu memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk narasi, teks bebas, atau yang disimpulkan dalam suatu karya tulis atau pun tidak tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian literasi dasar di SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran sesuai dengan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang salah satu kegiatannya dalam bentuk membaca 15 menit nonpelajaran sebelum waktu pelajaran dimulai dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan baik. Literasi ini tidak hanya membaca 15 menit nonpelajaran sebelum waktu pelajaran dimulai, tetapi ada beberapa proses yaitu mulai dari membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, merangkum hasil membaca, mendiskusikan hasil bacaan tersebut dikelas, menganalisis dan membuat sebuah karya. Dalam proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya dan mengkomunikasikan informasi.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kegiatan literasi (membaca dan menulis) siswa dianjurkan untuk membawa atau meminjam buku dipergustakaan sesuai dengan *genre* yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Hal tersebut dilakukan oleh siswa yang diwajibkan membaca 3 jenis buku dalam setiap semesternya. Dari hasil kegiatan tersebut siswa diharapkan dapat memberikan hasil rangkuman yang digunakan sebagai penilaian akademik yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia.

Kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan di SMAN 2 Malang yaitu literasi budaya membaca, menulis ringkasan buku/talesinopsis, target budaya membaca, literasi budaya menulis bagi peserta didik, literasi budaya menulis bagi pendidik/tauguru, dan penerbitan tabloid bahtera. Dari hasil kegiatan tersebut, SMAN 2 Malang mengadakan lomba literasi yaitu lomba perpustakaan kelas dan pojok kelas, Lomba Mengulas Karya Sastra (LMKS), lomba menulis cerpen, lomba menulis artikel, menerbitkan tabloid. Lomba literasi diikuti oleh antar kelas dan antar sekolah. Hasil dari kegiatan literasi tersebut dilaksanakan agar siswa/taupeserta didik dapat mengembangkan imajinasi, mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan humaniora.

Dalam kegiatan literasi di SMAN 2 Malang terdapat peran tim literasi dalam mengembangkan dan mengkoordinasi kegiatan literasi. Tim literasi sekolah membentuk tim khusus yang bertugas dalam kelangsungan program-program literasi sekolah. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian di SMAN 2 Malang telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah dengan baik.

b. Literasi Perpustakaan

Memberikan pemahaman cara membedakan bacaan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami

penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

Berdasarkan hasil penelitian literasi perpustakaan di SMAN 2 Malang pada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran Gerakan Literasi Sekolah (GLS) belum sesuai dengan Panduan Gerakan Literasi Sekolah. Karena dari beberapa tahap tersebut, siswa belum memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang bacaan dan mencari bahan pustaka. Hal ini dibuktikan dari tiga tahapan literasi perpustakaan belum terpenuhi secara keseluruhan. Tahapan yang telah sesuai dengan literasi perpustakaan yaitu tahap pembiasaan. Sedangkan dua tahapan lainnya yaitu tahap pengembangan dan tahap pembelajaran belum sesuai dengan Panduan Gerakan Literasi Sekolah.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Dye sebagaimana dikutip oleh Wahab (2014:16) mengemukakan bahwa terdapat tahap dalam proses kebijakan publik yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan menjadi paling penting karena dengan mengimplementasikan kebijakan, kita dapat mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kebijakan.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Gerakan Literasi

Sekolah (GLS) pada SMAN 2 Malang

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang cukup dikenal, salah satunya model Edward III (1980) yang diperkenalkan oleh George Edward III (1980). Model ini mengajukan 4 (empat) variabel yang berpengaruh untuk mensukseskan implementasi kebijakan, variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk memfokuskan penelitian, peneliti mengambil 4 variabel yakni komunikasi, sumber daya manusia yang merupakan satu diantara empat sumber daya yang berpengaruh menurut Edward III (1980), disposisi, dan struktur birokrasi dalam penelitian implementasi Gerakan Literasi Sekolah.

Berdasarkan model Edward III (1980) sebagaimana dijelaskan dalam bab II, dapat dilihat bahwa variabel yang ada yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tampak saling mempengaruhi dan bukan variabel yang berdiri sendiri. Pada gambar 1 pada bab II yang menunjukkan komunikasi, komunikasi adalah satu diantara 4 (empat) variabel yang langsung mempengaruhi implementasi. Selain itu, komunikasi juga mempengaruhi sumber daya. Komunikasi yang baik dan intens dapat menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Setelah mengetahui dengan baik sumber daya yang dibutuhkan, maka sebuah kebijakan dapat terimplementasikan. Sedikit berbeda dengan komunikasi yang mempengaruhi sumber daya, panah antara komunikasi dan disposisi adalah panah yang menggambarkan saling mempengaruhi. Setelah

menciptakan suatu komunikasi yang baik dan mengetahui sumber daya yang dibutuhkan, maka struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi akan mempengaruhi sikap para pelaku kebijakan, dan pelaku kebijakan akan mempengaruhi komunikasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sikap yang baik terhadap kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan.

Hal ini dilakukan oleh SMAN 2 Malang dalam melakukan kegiatan GLS.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian, komunikasi dalam implementasi GLS di SMAN 2 Malang adalah komunikasi formal dan tidak formal namun tidak rutin. Komunikasi formal meliputi rapat maupun sosialisasi. Namun komunikasi formal tersebut tidak dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Jika keberhasilan komunikasi yang dilihat dari tiga variabel yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi maka komunikasi dalam implemementasi GLS sudah efektif.

Komunikasi yang dilaksanakan oleh *policy makers* (pembuat kebijakan) bersifat *top-down* atau dari atas kebawah yakni digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat implementasi berhasil. Dimulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengesahkan Permendikbud yang kemudian menjadi *policy maker* menginformasikan Permendikbud kepada dinas pendidikan daerah.

Kejelasan komunikasi dalam implementasi GLS sudah efektif karena kegiatan pelaksanaan GLS terdapat kebijakan yang tertulis dan disosialisasikan dengan tepat. Mengenai tugas dan fungsi dalam kegiatan GLS telah terdapat komunikasi yang terarah dan sesuai dengan peraturan yang ada. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk perintah dari atasan bersifat konsisten dan tidak berubah.

Komunikasi yang efektif memberikan kejelasan apa yang menjadi bagian kewenangan dari tiap aktor dan bagaimana tiap aktor dapat saling mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Agustino (2014:150) yang menjelaskan pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan atau peraturan implementasi arus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Setiap peraturan atau kebijakan melibatkan *stakeholder* dan *target groups* sehingga memerlukan komunikasi yang efektif.

Menurut Agustino (2014:150) keberhasilan komunikasi diukur melalui tiga variabel yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi menghendaki penyaluran komunikasi yang sistematis dikarenakan komunikasi Gerakan Literasi Sekolah melibatkan struktur birokrasi dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan sehingga memerlukan intensifnya komunikasi agar informasi yang diterima dapat efektif. Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan

terdiri dari aturan formal yang mengatur mekanisme dan bentuk komunikasi *implementator* dan *target groups*. Konsistensi dalam komunikasi berbentuk perintah yang tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi *implementator* di lapangan dan *target groups*.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan penerapan atau pelaksanaan GLS di SMAN 2 Malang. Berdasarkan data yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini didukung dengan sedikitnya kendala yang muncul dalam implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Data yang disajikan peneliti pada subbab sebelumnya juga memperlihatkan bahwa sumber daya manusia terutama tenaga kependidikan masih tidak merata. Hal ini dibuktikan dengan jenjang pendidikan yang jauh berbeda. Terdapat beberapa lulusan sarjana, sedangkan beberapa lainnya lulusan SMP dan SMA. Ketimpangan ini dapat disembunyikan dengan pembagian tugas pokok dan fungsi dari setiap tim. Semisal, sumber daya yang memiliki kualitas bagus ditunjang dengan tingkat pendidikan yang tinggi diposisikan menjadi *leader* ataupun tim inti. Sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih diposisikan sebagai *staf* dan melakukan hal-hal yang sifatnya teknis.

Sejalan dengan pendapat Edward III (1980), sumber daya manusia adalah salah satu elemen dari empat elemen yang dimiliki variabel sumber daya model implementasi. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa komunikasi yang baik mempengaruhi sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan lewat intensitas tim dalam melakukan koordinasi sehingga dapat merumuskan kebutuhan tim baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sumber daya merupakan variabel kedua dalam model implementasi Edward III (1980). Sumber daya sendiri dibagi menjadi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan informasi dan kewenangan. Fokus dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang menjadi sumber daya paling menentukan dalam mensukseskan implementasi kebijakan. Edward III (1980) sebagaimana dikutip Widodo (2013:98) menyatakan, "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Widodo (2013:98) juga menambahkan bahwa sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian. Implementasi GLS di SMAN 2 Malang yang efektif memerlukan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Selain sumber daya manusia memiliki jumlah yang cukup juga harus didukung dengan pengetahuan para pelaksana mengenai kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan GLS di

SMAN 2 Malang adalah menerima dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sikap tersebut mempengaruhi intensitas disposisi para pelaksana. Kepatuhan sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang baru tidak menyebabkan terbatasnya partisipasi *stakeholder* dalam mengimplementasikan kebijakan. Komitmen yang tinggi dan integritas para pelaku kebijakan menyebabkan kebijakan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan sikap dan kemauan para pelaksana kebijakan yang di dalam hal ini. Pada implementasi GLS di SMAN 2 Malang, pembentukan tim literasi dalam kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik karena sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tugas pokok yang telah ada.

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan suatu kecenderungan yang dimiliki para pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan. Sejalan dengan pendapat Edward III (1980) dalam Widodo (2013:104) menegaskan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementator*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan”. Keberhasilan implementasi tidak hanya didukung oleh sumber daya yang cukup dan kemampuan namun juga kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi GLS di SMAN 2 Malang memerlukan kerja sama.

Apabila struktur birokrasi tidak secara jelas mengatur pelimpahan wewenang dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari masing-

masing unit maka pelaksanaan kebijakan juga dapat terhambat dan menimbulkan *missresponsibility* diantara para pelaksana kebijakan.

Struktur organisasi yang terfragmentasi atau terbelah-belah menyebabkan tidak efektif dan kurang kondusifnya pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan GLS di SMAN 2 Malang melibatkan warga sekolah. Mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/atau wali murid peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara struktur birokrasi implementasi GLS telah dipahami oleh pelaksana.

Struktur birokrasi diperlukan untuk mengatur sumber daya manusia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Meskipun sumber daya memadai dan *implementator* mengetahui dan mendukung implementasi kebijakan namun implementasi kebijakan tersebut tidak efektif tanpa pendelegasian kewenangan yang jelas dan efektif khususnya dalam pemerintahan. Sejalan dengan pendapat Widodo (2013:106) struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standart operating procedure*).





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, implementasi GLS pada SMAN 2 Malang masih pada komponen literasi dasar dan literasi perpustakaan. Namun telah menghasilkan beberapa program yaitu literasi budaya membaca, literasi budaya menulis, literasi atau budaya menulis bagi pendidik atau guru, penerbitan tabloid Bahtera yang mempunyai ISSN membuat karya tulis peserta didik atau siswa dan guru. Dari program kegiatan literasi, terdapat hasil kegiatan literasi yaitu lomba perpustakaan kelas dan pojok buku, lomba mengulas karya sastra, lomba menulis cerpen, lomba menulis artikel, dan menerbitkan tabloid. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi GLS di SMAN 2 Malang telah terimplementasi dengan baik sebab warga sekolah terutama peserta didik melakukan kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015.

Kedua, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan model Edward III adalah komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi adalah faktor-faktor yang paling dominan dalam implementasi GLS, dimana komunikasi bersifat jelas dan baik dari segi transmisi, kejelasan, dan konsisten. Sumber daya manusia sudah baik meskipun terdapat beberapa tenaga kependidikan yang jenjang pendidikannya dibawah SMP dan SMA yang sesuai dengan bidangnya. Sikap

dari para pelaksana dalam implementasi kebijakan GLS memiliki komitmen dan konsistensi yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengusulkan beberapa saran, yakni:

1. Sebaiknya peserta didik di SMAN 2 Malang lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dengan cara beraktivitas yang berhubungan dengan literasi di perpustakaan sekolah.
2. Sebaiknya SMAN 2 Malang menerapkan literasi media dalam informasi konten media digital. Sebab banyak permasalahan terjadi tentang fenomena bagaimana masyarakat merespon isu media sosial. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima informasi tanpa mengetahui akurasi informasi dan akan mudah menerima informasi atau berita *hoax*. Fenomena ini salah satu contoh bahwa Indonesia kurang mampu menangkap esensi literasi. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya literasi media khususnya media digital untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mencegah penyebaran berita palsu atau *hoax*. Dengan demikian perlu dilaksanakan literasi media.
3. Sebaiknya literasi teknologi dan literasi visual segera dilaksanakan. Agar dapat melengkapi komponen literasi yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.
4. Untuk mengoptimalkan keberhasilan komunikasi kegiatan GLS di SMAN 2 Malang perlu ditingkatkan dalam memberikan informasi

mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan GLS pada saat pertemuan rutin, sehingga apabila terdapat kekurangan dan permasalahan dapat segera diselesaikan.

- 5. Dengan terlaksananya implementasi GLS di SMAN 2 Malang perlu ditingkatkannya kegiatan tersebut sesuai dengan teori implementasi Edward III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- American Library Association. 1998. "Information Literacy", diakses pada 16 November 2016 dari <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aaslprtool/informationinpower/informationpower.cfm>.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Beers, C. S., Beers, J. W., & Smith, J. O. 2009. *A Principal's Guide to Literacy Instruction*. New York: Guilford Press, diakses pada tanggal 12 November 2016 dari <http://dikdas.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Sampul-DI-GLS.jpg>.
- Bukhori, Ahmad. 2005. *Menciptakan Generasi Literat*. diakses pada tanggal 14 November 2016 dari <http://dev.perpusnas.go.id/assets/uploads/2016/02/pemantapan-jaringan-pembinaan-perpustakaan-nasional-terhadap-perpustakaan-di-lingkungan-sekolah.pdf>.
- Chan Yuen Chin. 2001. *Rethinking Information Literacy*. A Study of Hongkong University Studetns, diakses pada tanggal 15 November 2016 dari <http://dev.perpusnas.go.id/assets/uploads/2016/02/menciptakan-generasi-literat-melalui-perpustakaan.pdf>.
- Clay, M. M. 2001. *Change Over Time in Children's Literacy Development*. Portsmouth: Heinemann, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 dari <https://readingrecovery.org/images/pdfs/Conferences/TLI15/Handouts/Doyle-Clays-Theoretical-Perspective.pdf>.
- Diakses pada tanggal 12 Juni 2017 dari <https://www.google.co.id/maps/>.
- Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 dari http://www.kompasiana.com/andimadyaputra/krisis-minat-baca-indonesia-dalam-masalah_5535a3d66ea8342512da42d2.
- Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 dari <http://www.ikapijateng.or.id>.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press: Washington.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



Gaffar, Afan, (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Cetakan V. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hancock, Vicki E. 2004. *Information literacy for lifelong learning*. diakses pada tanggal 20 November 2016 dari <http://www.libraryinstruction.com/information-literacy.html>.

Kemendikbud. 2016. *Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. 2016. *Desain Induk Gerakan Literasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. 2016. *Manual Pendukung Pelaksanaan Gerkan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. 2016. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kuder, S. Jay., Hasit, C. (2002). *Enhancing Literacy for All Student*. USA: Pearson Education Inc. diakses pada tanggal 12 November 2016 dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5559/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

Milles, Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. UI Press: Jakarta.

Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho Dwijowijoto, Riant. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana.

Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Rosenberg dkk. 2010. *Resource guide for family enegegement across the developmental pathway*. Harvard Family Research Project. diakses pada tanggal 12 November 2016 dari

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5559/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

Rusyana, Y. 1984. *Meningkatkan Minat dan Menanamkan Kebiasaan Baca Tulis pada Anak-anak*, Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan. Bandung: Diponegoro.

Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sutarno. 2008. *Kamus Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Jala Permata.

Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS: Surakarta.

Syafi'ie, Imam. 1998. *Retorika dalam Menulis*. Jakarta: Dirjen Dikti P2LPTK. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017 dari http://www.kompasiana.com/akipeffendy/hakikat-keterampilan-menulis_550eb183a33311b12dba83af.

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3.

UNESCO. 2007. *Understanding Information Literacy: A Primer*. France: UNESCO diakses pada tanggal 22 November 2016 dari <http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/157020E.pdf>.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solihin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Cetak Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing





LAMPIRAN



Denah SMAN 2 Malang



Pojok Baca Kelas

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kegiatan membaca 15 menit nonpelajaran sebelum pelajaran dimulai?
2. Apakah peserta didik memiliki jurnal harian?
3. Kapan kegiatan GLS dilaksanakan?
4. Apakah perpustakaan sekolah telah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik?
5. Apakah tenaga pendidik serta tenaga kependidikan ikut serta dalam kegiatan literasi?
6. Apakah sekolah melibatkan publik (orang tua, masyarakat) dalam mengembangkan kegiatan literasi?
7. Apakah tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai penilaian akademik?
8. Apakah terdapat penghargaan pencapaian peserta didik dalam kegiatan literasi?
9. Apa saja hasil pencapaian dalam kegiatan literasi?
10. Apa tindak lanjut dari hasil kegiatan yang telah menghasilkan tulisan tersebut?
11. Bagaimana sistem komunikasi yang dibangun oleh pemuat kebijakan?
12. Bagaimana sistem komunikasi yang dibangun kepada sasaran kebijakan?
13. Bagaimana sosialisai yang dilakukan untuk kegiatan GLS?
14. Apakah terdapat staff ahli atau tim yang mampu dalam mengimplementasikan GLS?

PENGEMBANGAN LITERASI - SMP

AS : XII - MIPA 4

HARI / TANGGAL : RABU 12

NIS	NAMA PESERTA DIDIK	JK	JUDUL BUKU / NOVEL	HALAMAN YANG DIBACA	PARAF SISWA	PARAF GURU	KETERANGAN
16661	ACHMAD SAYROFI	L	Rantav 1 Muara	25-28	Sny	Sny	Tidak
16666	ADELIA FARHANA	P	Ranah 3 warna	75-78	Adibi	Sny	Tidak merangi
16677	AGUS SLAMET WAHYUDI	L	Tenggalang - Kapal Van der Wigch	16-19	Sny	Sny	
16679	ALFAJRI ZULVANDIO PUTRA	L	Athers	76-78	Sny	Sny	tidak baca
16681	ALFIAN NURCHOLIS SETYAWAN	L	Lupus kecil	101-110	Sny	Sny	
16735	DEWI APERTA SUBAGYO	P	Sang Pemimpi	175-179	Sny	Sny	tidak buku
16745	DITA AYU ANITA	P	Ranah 3 Warna	73-82	Sny	Sny	Merangkum
16747	DWI FEBY ARDIYANA	P	Sang Pemimpi	39-44	Sny	Sny	tidak menulis
16781	HARDI SETYA BHAKTI	L	Sang Pemimpi	65-70	Sny	Sny	tidak menulis
16785	ICHSAN ASHIDDIQI	L	Sang Pemimpi	23-26	Sny	Sny	tidak baca
16792	INDAH ISMAWATI	P	Marganah karpau	79-81	Sny	Sny	
16802	KHANSA FIDIANZI ZHA FIRAH	P	Sang Pemimpi	131-145	Sny	Sny	tdk bawa
16807	KURNIA INDRIANI	P	Lupus ABG	119-132	Sny	Sny	Tidak menulis
16819	MARIYAH ULFAH	P	Supernova : KPB	197-214	Sny	Sny	tidak menulis
16817	MARTIN IQBAL MAHENDRA	L	mimpi - mimpi lintang	104-109	Sny	Sny	
16822	MAYSKE ERICHA DEWI SURYANTI	P	Sang pemimpi	105-108	Sny	Sny	
16828	MOHAMMAD ILHAM SYAH	L			Sny	Sny	Tidak menulis
16830	MOHAMMAD LUKMAN HAKIM	L	Kalkulus	171-175	Sny	Sny	Tidak menulis
16852	NADILA DIAN FITRIA	P	Ranah 3 warna	165-170	Sny	Sny	tdk menulis
16905	IRIZA FARADIBA	P	Fisika	01-13	Sny	Sny	tdk memb



LAPORAN KEMAJUAN
PENGEMBANGAN LITERASI - SMA NEGERI 2 MALANG

KELAS : XII - MIPA 4

HARI/TANGGAL : RABU / OKTOBER 20

NO	NIS	NAMA PESERTA DIDIK	JK	JUDUL BUKU / NOVEL	HALAMAN NYANG DIBACA	PARAF SISWA	PARAF GURU	KETERAN
21	16907	RIZKA RAMADHANI	P	Ramah 3 warna-	99-116	Suka	Sy	fbk bawa
22	16910	RIZKY OKTAVIA MEI WULANDARI	P	Layar Terkembang	39-45	Suka	Sy	Tidak membawa
23	16916	SAHIRAH MASRUROH	P	Siti Nurbaya	55-64	Suka	Sy	Tidak membawa
24	16919	SANIA NUR AZIZAH	P	Sang Pemimpi	103-116	Suka	Sy	Tidak menulis
25	16920	SARIDEVI SUCI SARASWATI	P	Mangyah Komov (2)	10-15	Suka	Sy	Tidak menulis
26	16924	SHADILLA	P	Tafsir Al-usy Al- Akhir	97-116	Suka	Sy	Tidak menulis
27	16945	TIVANLY YUSRIL INDIRWAN	L	-	-	Suka	Sy	Tidak menulis
28	16950	WILDAN FIRDAUSI	L	Belendung	40-42	Suka	Sy	Tidak menulis
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

NAMA GURU MAPEL

Suwardi

LAPORAN KEMAJUAN
PENGEMBANGAN LITERASI - SMA NEGERI 2 MALANG

KELAS : XII - MIPA 4

HARI / TANGGAL : KAMIS / 3 NOV '16

NO	NIS	NAMA PESERTA DIDIK	JK	JUDUL BUKU/NOVEL	HALAMA NYANG DIBACA	PARAF SISWA	PARAF GURU	KETER
1	16661	ACHMAD SAYROFI	L	Rantau 1 marga		[Signature]	[Signature]	Mem b
2	16666	ADELIA FARHANA	P	Ramah 3 warna	116 - 121	[Signature]	[Signature]	
3	16677	AGUS SLAMET WAHYUDI	L	Tenggelamnya Kapal Van der Wijck	130 - 144	[Signature]	[Signature]	Menulis
4	16679	ALFAJRI ZULVANDIO PUTRA	L	Sang pemimpi	67-77	[Signature]	[Signature]	
5	16681	ALFIAN NURCHOLIS SETYAWAN	L	Sang Pemimpi	117-129	[Signature]	[Signature]	menulis
6	16735	DEWI APERTA SUBAGYO	P	Sang Pemimpi	123-136	[Signature]	[Signature]	
7	16745	DITA AYU ANITA	P	Ramah 3 Warna	180 - 185	[Signature]	[Signature]	Membaca
8	16747	DWI FEBY ARDIYANA	P					
9	16781	HARDI SETYA BHAKTI	L	Sang Pemimpi	181-191	[Signature]	[Signature]	menulis
10	16785	ICHSAN ASHIDDIQI	L	Sang Pemimpi	149-155	[Signature]	[Signature]	menulis
11	16792	INDAH ISMAWATI	P					
12	16802	KHANSA FIDIANZI ZHA FIRAH	P	Sang Pemimpi				
13	16807	KURNIA INDRIANI	P	Supernova... Akar	209-217	[Signature]	[Signature]	
14	16819	MARIYAH ULFAH	P	Adiswami in Paris	28 - 33	[Signature]	[Signature]	Membaca
15	16817	MARTIN IQBAL MAHENDRA	L	Mimpi - mimpi lintang	1-62	[Signature]	[Signature]	Menulis
16	16822	MAYSKE ERICHA DEWI SURYANTI	L		151-158	[Signature]	[Signature]	Menulis dan
17	16828	MOHAMMAD ILHAM SYAH	P	Sang Pemimpi	187-217	[Signature]	[Signature]	Menulis
18	16830	MOHAMAD LUKMAN HAKIM	L	Margemah Karpov	293-297	[Signature]	[Signature]	
19	16852	NADILA DIAN FITRIA	L	Lower tekambony	49-51	[Signature]	[Signature]	
20	16905	RIZA FARADIBA	P	Madella Spring in London Layar Berkebang	124-238	[Signature]	[Signature]	Menulis member

LAPORAN KEMAJUAN
PENGEMBANGAN LITERASI - SMA NEGERI 2 MALANG

KELAS : XII - MIPA 4

HARI / TANGGAL :

NO	NIS	NAMA PESERTA DIDIK	JK	JUDUL BUKU / NOVEL	HALAMAN NYANG DIBACA	PARAF SISWA	AF GURU	KETERANGAN
21	16907	RIZKA RAMADHANI	P	Ramah 3 Warna	366-487	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	menulis & m...
22	16910	RIZKY OKTAVIA MEI WULANDARI	P	Layar Terkembang	81-98	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	menulis & m...
23	16916	SAHIRAH MASRUOH	P	The Friend Zone	50-63	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Membaca
24	16919	SANIA NUR AZIZAH	P	Jingga dalam Elegi	267-280	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	membaca
25	16920	SARIDEVI SUCI SARASWATI	P	Eye Shadow	163-172	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	menulis
26	16924	SHADILLA	P	Pudarnya Pesona Clopatra	7-8	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27	16945	TIVANLY YUSRIL INDIRWAN	L	Sang Pemimpi	130-140	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28	16950	WILDAN FIRDAUSI	L	163-172 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	menulis
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

NAMA GURU MAPEL

WAHYU WIDOWATI

LAPORAN KEMAJUAN
PENGEMBANGAN LITERASI - SMA NEGERI 2 MALANG

KELAS : XII - MIPA 4

HARI / TANGGAL : Selasa / 1 November

NO	NIS	NAMA PESERTA DIDIK	JK	JUDUL BUKU / NOVEL	HALAMA NYANG DIBACA	PARAF SISWA	PARAF GURU	KETER
1	16661	ACHMAD SAYROFI	L					
2	16666	ADELIA FARTHANA	P	Panah 3 warna	109 - 115	<i>[Signature]</i>		
3	16677	AGUS SLAMET WAHYUDI	L	Tenggelamnya Kapal Van der Wijck	94 - 100	<i>[Signature]</i>		Menurut
4	16679	ALFAJRI ZULVANDIO PUTRA	L	Sang Pemimpi	84-88	<i>[Signature]</i>		menurut
5	16681	ALFIAN NURCHOLIS SETYAWAN	L					
6	16735	DEWI APERTA SUBAGYO	P					
7	16745	DITA AYU ANITA	P					
8	16747	DWI FEBY ARDIYANA	P					
9	16781	HARDI SETYA BHAKTI	L	Sang pemimpi	165-170	<i>[Signature]</i>		menurut
10	16785	ICHSAN ASHIDDIQI	L					
11	16792	INDAH ISMAWATI	P					
12	16802	KHANSA FIDIANZI ZHAFFIRAH	P					
13	16807	KURNIA INDRIANI	P					
14	16819	MARIYAH ULFAH	P					
15	16817	MARTIN IQBAL MAHENDRA	L					
16	16822	MAYSKE ERICHA DEWI SURYANTI	P	Sang Pemimpi	165-170	<i>[Signature]</i>		Menurut
17	16828	MOCHAMMAD ILHAM SYAH	L					
18	16830	MOHAMAD LUKMAN HAKIM	L					
19	16852	NADILA DIAN FITRIA	P					
20	16905	RIZA FARADIBA	P					

